

**Partisipasi perempuan dalam
musyawarah perencanaan pembangunan
(studi deskriptif kualitatif tentang partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan
pembangunan di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta)**



Oleh :

Sri Ekawati
NIM : D.0303058

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Sosiologi**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

Disetujui Untuk Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Dosen Pembimbing

Drs. Argyo Demartoto, M.Si
NIP. 196508251992031003

LEMBAR PENGESAHAN

Telah Diterima dan Disahkan Oleh Panitia Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 12 Juli 2010

Panitia Penguji Skripsi :

1. Dra. Trisni Utami, M.Si (.....)
(NIP. 196310141988032001) Ketua
2. Dra. Sri Hilmi. P, M.Si (.....)
(NIP. 196307301991032001) Sekretaris
3. Drs. Argyo Demartoto, M.Si (.....)
(NIP. 196508251992031003) Penguji

Mengetahui, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta Dekan <u>Drs. H. Supriyadi, SN,SU</u> NIP : 195301281981031001

MOTTO

*Hidup adalah perjuangan
Sepahit apapun tetaplah berjuang
Jangan pernah putus asa
(Penulis)*

*Berjuanglah
Untuk hari esok akan lebih baik
(Penulis)*

*belajarlah dari pengalaman
ambilah hikmah dari semuanya
(Penulis)*

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan setulus hati dan mengucap syukur kepada Allah SWT karya ini kupersembahkan kepada

:

Hidupku

Yang telah berjuang untuk memberikan yang terbaik dalam hidup ini

Adik-adikku

Yang telah memberiku semangat untuk hidup

Sahabat jiwaku

Yang telah mengajarku apa itu cinta, kesetiaan , dan menghargai

Ayah ibuku

Yang mengharapkan anak-anaknya menjadi orang yang sukses dan berguna

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam menyusun skripsi ini membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Supriyadi SN, SU, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Dra. Hj. Trisni Utami, M.Si, selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Drs. TH. A. Gutama, selaku Pembimbing Akademik
4. Bapak Drs. Argyo Demartoto, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan , motivasi, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Mas Bowo yang telah memberiku semangat dan perhatian untuk menyelesaikan skripsi ini. Semangat dan berjuanglah.
6. Keluargaku yang selalu memberi semangat untuk selalu berjuang.
7. Semua teman-teman yang telah membantu penyelesaian skripsi ini Herly, SPEK-HAM, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Semoga karya ini bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
LEMBAR PERSETUJUAN		ii
LEMBAR PENGESAHAN		iii
LEMBAR MOTTO		iv
LEMBAR PERSEMBAHAN		v
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI		viii
DAFTAR TABEL		xi
DAFTAR BAGAN		xii
DAFTAR MATRIK		xiii
ABSTRAK		xiv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah	9
	C. Tujuan Penelitian	10
	1. Tujuan Operasional	10
	2. Tujuan Fungsional	10
	D. Manfaat Penelitian	10
	1. Manfaat Teoritis	10
	2. Manfaat Praktis	11
	E. Tinjauan Pustaka	11
	1. Landasan teori	11

	a. Kajian Tentang Gender dan Pembangunan	11
	b. Teknik Analisis Gender Harvard	18
	c. Partisipasi	23
	d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	30
	2. Kerangka Berfikir	50
	F. Definisi Konseptual	51
	1. Partisipasi	51
	2. Perempuan	52
	3. Musrenbang	52
	G. Metode Penelitian	52
	1. Jenis Penelitian	52
	2. Lokasi Penelitian	53
	3. Sumber Data	53
	4. Teknik Pengambilan Sampel	54
	5. Teknik Pengumpulan Data	55
	6. Validitas Data	56
	7. Teknik Analisa Data	58
BAB II	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	60
	A. Keadaan Geografis	60
	B. Keadaan penduduk	61
	C. Sarana dan Prasarana	65
	D. Struktur Organisasi Pemerintahan	67

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
	A. Hasil Penelitian	70
	1. Profil Informan	70
	2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) Dalam Perspektif Gender	74
	2.1 Pra Musrenbangkel	75
	2.2 Musrenbangkel	81
	2.3 Aktivitas Perempuan di dalam Musrenbangkel	90
	2.4 Akses Perempuan di dalam Musrenbangkel	93
	2.5 Kontrol Perempuan di dalam Musrenbangkel	99
	2.6 Manfaat Yang Diperoleh Perempuan di dalam Musrenbangkel	103
	2.7 Faktor-Faktor Yang Menghambat Perempuan Berpartisipasi	104
	2.8 Bentuk-bentuk Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbangkel	111
	B. Pembahasan	113
BAB IV	PENUTUP	121
	A. Kesimpulan	121
	B. Implikasi	124
	C. Saran	129
	DAFTAR PUSTAKA	131
	LAMPIRAN	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Unsur Peserta yang Mengikuti Musrenbangkot Tahun 2009	7
Tabel 1.2	Unsur Peserta Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2009	8
Tabel 2.1	Batas Wilayah Kelurahan Joyosuran	61
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	62
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	63
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	64
Tabel 2.5	Komposisi Penduduk Menurut Agama	65
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Keturunan	65
Tabel 2.7	Sarana Perhubungan	66
Tabel 2.8	Sarana Kesehatan	67
Tabel 2.9	Sarana Pendidikan	67
Tabel 3.1	Unsur-Unsur Peserta Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010	83
Tabel 3.2	Unsur-Unsur Peserta Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010 Menurut Jenis Kelamin	84
Tabel 3.3	Daftar Delegasi Musrenbangcam 2010	87
Tabel 3.4	Komposisi Peserta Sidang Komisi Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010	95
Tabel 3.5	Komposisi Panitia Musrenbangkel Joyosuran Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010	100

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Mekanisme Musrenbangkel	49
Bagan 1.2	Kerangka Berfikir	51
Bagan 1.3	Model Analisis Interaktif	59
Bagan 2.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Joyosuran	69

DAFTAR MATRIKS

Matriks 3.1	Profil Informan	74
Matriks 3.2	Profil Aktivitas Dalam Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010 ..	93
Matriks 3.3	Profil Akses Dalam Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010	98
Matriks 3.4	Profil Kontrol Dalam Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010	103
Matriks 3.5	Profil Manfaat Dalam Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010 ...	104
Matriks 3.6	Faktor-Faktor Yang Menghambat Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010	110
Matriks 3.7	Bentuk-Bentuk Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010	112

ABSTRAK

**Sri Ekawati, D0303058, Juli 2010. Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Partisipasi Perempuan**

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tahun 2010).

Penelitian ini didasarkan pada keingintahuan dan ketertarikan penulis tentang bagaimana partisipasi perempuan di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dari sudut pandang sosiologi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap sembilan (9) informan, yang terdiri Ketua Panitia Pengarah (SC), Ketua LPMK, Kepala Kelurahan, peserta perwakilan perempuan dalam Musrenbangkel, Ketua RT, Ketua RW. Untuk validitas data menggunakan observasi dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah dari buku, internet, jurnal Internasional, dan monografi Kelurahan. Analisa data menggunakan metode analisis interaktif, validitas data menggunakan triangulasi sumber.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi sedangkan untuk mengkaji masalah ini menggunakan teknik analisis gender model Harvard yaitu untuk mengetahui partisipasi perempuan dikaji berdasarkan profil aktivitas, kontrol, akses, dan manfaatnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk-bentuk partisipasi langsung perempuan di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2010 yaitu menghadiri Musrenbangkel sebagai utusan atau perwakilan RW, PKK, Posyandu, ikut terlibat dalam susunan kepanitiaan Musrenbangkel, menyampaikan usulan di dalam sidang Musrenbangkel baik sidang pleno maupun sidang komisi, serta menjadi perwakilan sebagai utusan Kelurahan untuk ikut terlibat dalam Musrenbangcam.

Secara teoritis hasil penelitian ini mendukung teknik analisis gender yang digunakan dimana menekankan pada partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas perempuan bisa dikatakan cukup aktif dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 dengan keterwakilan perempuan sebesar 37%. Akses perempuan ditunjukkan dengan adanya keterlibatan perempuan dalam sidang komisi. Sedangkan kontrol dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 masih kurang dimiliki oleh perempuan. Ada manfaat yang dirasakan perempuan antara lain menambah pengalaman mereka.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi perempuan dalam Musrenbang tahun 2010 di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta sudah cukup baik sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 18 A tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi politik di Indonesia sebenarnya memberikan harapan besar bagi kaum perempuan yang selama 32 tahun terpasung hak politiknya. Gerakan-gerakan perempuan yang sebelumnya tidak mempunyai energi, muncul dengan berbagai usaha pemberdayaan hak-hak perempuan, khususnya hak politik, dalam rangka mengentaskan perempuan dari kubangan politik yang destruktif. Namun, di era reformasi ini tidak bisa menghilangkan apatisme dan ketidakberdayaan perempuan yang selama puluhan tahun dijebloskan oleh sistem politik yang hegemonik dan represif. Kondisi peran perempuan menjadi sangat buruk bila melihat realitas politik di tingkat massa, di mana perempuan tidak lebih sebagai obyek politik. Dalam sistem politik yang berlaku selama ini, kebijakan yang berlaku menempatkan perempuan sebagai *second person*.

(Utami, 2001: vii)

Selama itu pula, penyelenggaraan kebijakan publik di tanah air dapat dikatakan tidak memberi peluang yang cukup bagi warga masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, peluang untuk itu dibuka dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada UU ini berbeda dengan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang menyatakan secara eksplisit partisipasi masyarakat sebagai bagian dalam pembangunan. UU Nomor 22 Tahun 1999 ini bersama dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah disebut sebagai paket Undang-Undang Otonomi Daerah, karena kedua peraturan perundangan-undangan itu memberikan otonomi yang luas kepada daerah untuk mengurus kepentingannya sendiri.

Sayangnya, hak warga masyarakat khususnya perempuan untuk berpartisipasi tidaklah diikuti dengan kewajiban pemerintah daerah untuk membuka ruang partisipasi serta tidak adanya sanksi terhadap aparat pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Hal ini terjadi, karena tidak ada mekanisme yang rinci dan jelas mengenai pelibatan masyarakat dalam kebijakan publik, yang meliputi mekanisme penyampaian aspirasi, mekanisme pengawasan, dan mekanisme sanksi kepada pemerintah. Sehingga otonomi daerah hanyalah dipahami sebagai perpindahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setempat. Sehingga bukannya partisipasi warga masyarakat yang berkembang, justru yang muncul adalah “raja-raja kecil” yang diperankan oleh aparat pemerintah daerah dan legislatif daerah.

(Dwi , 2002: 4-6)

Komitmen pelibatan warga masyarakat pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tertuang dalam pasal 92 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan, pemerintah daerah perlu mengikutsertakan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat ini dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan penjelasan pasal tersebut yang menyatakan bahwa rakyat diberi peluang untuk ikut serta mempengaruhi proses penentuan kebijakan lokal. Para penentu kebijakan juga diharuskan menerima dan menindaklanjuti aspirasi yang disuarakan oleh rakyat.

Di kota Solo, mekanisme partisipasi di wadah melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kegiatan ini berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 18 A tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota.

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah. Salah satu hal yang sangat penting untuk dicermati adalah partisipasi masyarakat, khususnya perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, maupun di tingkat Kota. Di tingkat Kelurahan, proses Musrenbang masih sering menggunakan delegasi pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), sedangkan mayoritas pengurus dan tokoh masyarakat di lingkup RT maupun RW masih dipegang oleh laki-laki. Hal tersebut juga turut mempersulit partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan. Minimnya keterwakilan perempuan menyebabkan pembahasan Musrenbang sangat berwajah infrastruktur dengan kata lain pembangunan identik dengan pembangunan fisik. Pembahasan yang terjadi didasarkan pada kebutuhan semu yang disampaikan beberapa orang dan bukan kebutuhan (*need*) yang berdasarkan pada analisa masalah di masyarakat.

Musrenbang sebagai wadah silaturahmi antar masyarakat dengan *stakeholders* pembangunan lainnya untuk mendapatkan keserasian antara kebijakan pembangunan yang ada serta untuk menjaring semua pemangku kepentingan. Dengan adanya Musrenbang diharapkan tidak ada kegiatan-kegiatan pembangunan yang tumpang tindih yang mengakibatkan sumber daya pembangunan yang terbatas tidak teralokasikan dengan optimal dan tidak ada aspirasi masyarakat yang terabaikan.

Dalam pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat kelurahan hingga di tingkat nasional, disebutkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) bahwa perempuan

harus dipastikan ikut berpartisipasi. Bahkan, perwakilan perempuan harus dipastikan masuk ke dalam setiap pengiriman delegasi di setiap tahapan Musrenbang yang lebih tinggi. Dengan berpartisipasinya perempuan di setiap Musrenbang, perempuan dapat berpartisipasi untuk memasukkan agenda-agenda kebutuhannya sehingga kebutuhan dan kepentingannya dapat terwakili.

Berdasarkan pada cara keterlibatannya partisipasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu ; partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung terjadi bila diri orang itu menampilkan kegiatan tertentu di dalam proses partisipasi, seperti misalnya mengambil peranan di dalam pertemuan-pertemuan, turut berdiskusi, menyumbangkan tenaganya untuk turut berkampanye dalam PEMILU agar calonnya dapat masuk menjadi anggota DPR. Sedangkan partisipasi tidak langsung terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya, misalnya dalam pengambilan keputusan, kepada orang lain yang berikutnya dapat mewakilinya dalam kegiatan-kegiatan pada tingkatan yang lebih tinggi. Pemilihan wakil-wakil di dalam DPR, Senat Mahasiswa, dewan-dewan Koperasi dan lain sebagainya adalah contoh bentuk partisipasi ini. (Slamet, 1993: 12)

Berdasarkan kajian dan riset yang didukung hasil pemantauan Musrenbang Kota Solo Tahun 2007 oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Surakarta, masih ditemukan persoalan-persoalan partisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran. Mungkin inilah yang menjadi alasan kuat Musrenbang mulai kehilangan spirit “demokrasi”.

Pertama; Musrenbang masih merupakan proses politik di mana masing-masing pihak ingin memperjuangkan kepentingannya sendiri. Akibatnya, susunan angka-angka dalam program kegiatan juga angka politik. Keengganan masyarakat di tingkat kampung RT/RW untuk mengadakan pertemuan pra-Musrenbangkel menyebabkan usulan yang muncul berdasarkan subyektivitas politik peserta, bukan musyawarah dari rakyat di bawah.

Kedua; tingkat representasi peserta belum sepenuhnya mewakili masyarakat lokal, termasuk perempuan. Di beberapa kelurahan tidak ada kehadiran RT sama sekali dan peserta yang hadir berdasarkan keinginan pribadi panitia penyelenggara (SC atau OC). Apalagi perwakilan dari kelompok masyarakat miskin dipastikan tidak terakomodir. Artinya, menurunnya jumlah peserta Musrenbang mengurangi tingkat keterwakilan dan legitimasi perencanaan.

Ketiga; keterputusan partisipasi masyarakat di tingkat perencanaan dengan proses penganggaran. Sejauh ini partisipasi masyarakat terhenti di tingkat perencanaan saja, keinginan untuk dapat mengawal usulan program/kegiatan di tingkat penganggaran tidak ada ruang sama sekali. Penganggaran masih menjadi kamar spesial milik eksekutif dan DPRD.

Keempat; rendahnya kapasitas pelaku Musrenbang dalam teknik *planning* dan *budgeting*. Artinya rendahnya kemampuan teknik-teknik perencanaan dan penganggaran peserta mempengaruhi kualitas program/kegiatan.

Kelima; peran dominan Bappeda dan SKPD dalam Musrenbang. Akibatnya dalam setiap pelaksanaan Musrenbang dua unsur birokrasi di atas lebih berkemampuan dalam teknis perencanaan dan penganggaran.

Keenam; tim monitoring dan evaluasi (monev) rencana pembangunan kota sudah tidak efektif. Karena Bappeda enggan melibatkan masyarakat, sosialisasi hasil-hasil pelaksanaan Musrenbang beserta kendala pembangunan selama satu tahun tidak dilakukan secara transparan (Solopos, 16/02/2007).

Padahal dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Meneg Bapennas dan Mendagri Nomor 1181/M.PPN/02/2006-050/244/SJ Tahun 2006 tentang Juknis Penyelenggaraan Tim Monev Musrenbang mengisyaratkan keterlibatan masyarakat dan DPRD dalam kegiatan ini. Partisipasi

sekedar mengizinkan rakyat berpendapat tentang keinginan dan harapannya, sedang pengambilan keputusan akhir masih menjadi hak veto para elit daerah. Rakyat boleh berencana tapi pemerintah daerah yang memutuskan.

Untuk memantau tingkat partisipasi perempuan di tingkat lokal Surakarta, data Musrenbangkot Surakarta dapat menjadi data yang cukup mewakili partisipasi langsung perempuan dalam perencanaan pembangunan. Musrenbangkot Surakarta merupakan forum masyarakat tahunan tertinggi di Kota Surakarta. Pada tahun 2009 (dapat dilihat dari tabel 1.1) menunjukkan bahwa di tingkat lokal, jumlah partisipasi langsung perempuan masih terhitung di bawah 30 %.

Tabel 1.1

Unsur Peserta yang Mengikuti Musrenbangkot Tahun 2009

No	Unsur Peserta	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Delegasi Musrenbangcam	53	6	59
2	Delegasi Forum SKPD	22	5	27
3	SKPD di Lingkungan Pemkot	49	35	84
4	LSM	8	2	10
5	Perguruan Tinggi	8	5	13
6	Ormas dan Pemuda	7	-	1
7	Sektor informal	10	-	10
8	Sektor Privat	12	3	15
9	Tokoh Agama	3	-	3
10	Budayawan	1	-	1
11	Tokoh Masyarakat	-	2	2

12	Organisasi Profesi	19	1	20
13	Organisasi Perempuan	4	5	9
14	Anggota DPRD Surakarta	19	1	20
15	Perwakilan Partai Politik	6	2	8
16	Lurah	45	7	52
17	LPMK	36	2	38
	Jumlah	302	76	378
	Prosentase (%)	80	20	100

Sumber : Diolah dari Data Primer Bapeda Kota Surakarta

Sedangkan tingkat partisipasi langsung perempuan di dalam Musrenbangkel di Kelurahan Joyosuran tahun 2009 prosentase keterwakilan perempuan masih di bawah 30%. Adapun peserta Musrenbangkel Joyosuran tahun 2009 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Unsur Peserta Musrenbangkel Joyosuran
Tahun 2009

No	Elemen Peserta	L	%	P	%	Jumlah	%
1	Sektor Privat	15	20	3	4	18	24
2	Tokoh Masyarakat	2	3	-	-	2	3
3	Karang Taruna	2	3	-	-	2	3
4	LPMK	2	3	-	-	2	3
5	Kelurahan	4	5	4	5	8	11

6	RT	-	-	-		-	-
7	RW	22	29	5	7	27	36
8	Organisasi Sosial	7	9	9	12	16	21
	Jumlah	54	72	21	28	75	100

Sumber : Diolah dari data primer Kelurahan Joyosuran

Di dalam petunjuk teknis pelaksanaan baik Musrenbangkel, Musrenbangcam ataupun Musrenbangkot telah disebutkan bahwa keterwakilan unsur perempuan diupayakan minimal 30 % dari jumlah keseluruhan peserta. Namun apabila kita melihat prosentase dari kedua tabel di atas, peserta laki-laki dan perempuan di dalam Musrenbangkot Surakarta dan Musrenbangkel Joyosuran terlihat adanya ketimpangan yang besar antara laki-laki dan perempuan. Bahkan untuk prosentase minimal 30 % seperti yang tertulis di dalam peraturan formalnyapun tidak terpenuhi.

Salah satu permasalahan utama dalam perencanaan pembangunan partisipatif adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran perempuan untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Perempuan mempunyai peranan yang strategis dalam mengaspirasikan kepentingannya melalui forum Musrenbangkel. Banyak kepentingan yang harus diperjuangkan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan seperti pendidikan, kesehatan, serta masih banyak lagi yang selama ini belum terakomodir dalam perencanaan tingkat kelurahan. Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tahun 2010 yang dirumuskan sebagai permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penulis hendak mengkaji mengenai “Bagaimanakah partisipasi perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta yang ditinjau dari :

1. Profil aktivitas perempuan di Kelurahan Joyosuran dalam Musrenbangkel.
2. Akses perempuan di Kelurahan Joyosuran dalam Musrenbangkel.
3. Profil kontrol perempuan di Kelurahan Joyosuran dalam Musrenbangkel.
4. Manfaat Musrenbangkel bagi perempuan di Kelurahan Joyosuran.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Operasional

Untuk meneliti aspek-aspek yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan partisipatif yang mencakup partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif ditinjau dari aspek aktivitas, akses, kontrol, dan manfaatnya bagi perempuan.

2. Tujuan Fungsional

Untuk memberikan informasi, masukan, dan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka penerapan perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Surakarta yang lebih meningkatkan kualitas partisipasi perempuan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan tercapainya tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dipakai dalam sebagai bahan pertimbangan serta kepustakaan untuk penelitian sejenis.
- b. Meningkatkan pengetahuan bersama tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan proses penganggaran.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka penyusunan strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- c. Menambah wawasan pembaca tentang partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

a. Kajian Tentang Gender dan Pembangunan

Untuk mengkaji gender lebih jauh sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu pengertian gender. Gender yakni suatu sifat yang melekat terhadap kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.

(Fakih, 2005: 8)

Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam arti: memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan pembangunan.

(Handayani dan Sugiarti, 2008: 6)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutaman Gender dalam Pembangunan di Daerah, memberikan pengertian gender sebagai konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Konstruksi sosial yang membentuk perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan itu pada kenyataannya mengakibatkan berbagai ketidakadilan terhadap perempuan. Perbedaan peran, status, wilayah, dan sifat mengakibatkan perempuan tidak otonom. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan membuat

keputusan baik untuk diri pribadi maupun lingkungannya karena adanya perbedaan tersebut. Berbagai bentuk ketidakadilan tersebut adalah :

- a. Subordinasi dapat diartikan sebagai meletakkan perempuan sebagai warga kelas dua dan dinilai lebih rendah dari laki-laki. Perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan meskipun beban pekerjaan yang ditanggungnya sama merupakan contoh dari subordinasi tersebut.
- b. Marjinalisasi atau peminggiran adalah upaya untuk menyingkirkan perempuan dari fungsi-fungsi tertentu, terutama yang berkaitan dengan pembuatan keputusan dan kepemimpinan. Adanya pandangan bahwa perempuan tidak bisa jadi pemimpin negara merupakan salah satu praktek marjinalisasi.
- c. Stereotip adalah pemberian label terhadap perempuan. Contohnya adalah pemberian label ibu rumah tangga pada perempuan. Karena perempuan itu merupakan ibu rumah tangga, maka ia harus tinggal di rumah untuk mengasuh anak.
- d. Beban ganda adalah pembebanan tanggung jawab dan kewajiban secara berlebihan. Perempuan yang bekerja di sektor publik, misalnya setelah pulang kerja masih harus mengurus urusan rumah tangga, seperti melayani suami dan mengasuh anak.
- e. Kekerasan terhadap perempuan terjadi karena perempuan dianggap lemah sehingga menjadi obyek tindakan kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Tindakan penganiayaan oleh suami terhadap istrinya merupakan salah satu contoh kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

(Dwi, 2002: 8-9)

Di dalam pembangunan, perempuan juga merupakan subyek yang seharusnya dilibatkan juga baik dalam proses maupun manfaatnya. Pemerintah juga berupaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui landasan yuridis Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional yang mengamanatkan agar setiap lembaga pemerintah memastikan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam setiap tahapan kegiatan pembangunannya, baik di tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Tujuan dari PUG yang merupakan komitmen nasional maupun internasional ini adalah agar perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan dan berpartisipasi serta memiliki kontrol dan manfaat yang sama dalam pembangunan sehingga pada akhirnya dapat mengurangi ataupun mempersempit kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah, kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kesetaraan dan keadilan gender yaitu suatu kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang atau kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan baik di dalam maupun di luar rumah tangga.

Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka pemerintah mengupayakan pembangunan pemberdayaan perempuan di Indonesia dalam rangka

kesejahteraan perempuan. Berikut ini adalah berbagai pendekatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan WID (*Women In Development*)

Tahun 1970 muncul konsep *Women In Development* (WID), yang merupakan strategi untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dengan menawarkan strategi pembangunan yang meletakkan perempuan sebagai aset dan sasaran, bukan sebagai beban pembangunan. Hal ini antara lain dilakukan dengan meningkatkan produktivitas dan pendapatan perempuan, memperbaiki kemampuan perempuan untuk mengatur rumah tangga, mengintegrasikan perempuan dalam proyek, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan meningkatkan kesehatan, pendapatan atau sumber daya.

Pendekatan WID berpijak dari dua sasaran yaitu :

- a. Pentingnya prinsip egalitarian, oleh karena itu dalam WID antara laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama sebagai mitra sejajar.
- b. WID menitikberatkan pada pengadaan program yang dapat mengurangi diskriminasi yang dialami oleh para perempuan di sektor produksi. Selain itu masih kuatnya anggapan bahwa peran-peran produktif hanya dapat dilakukan oleh kaum laki-laki sedangkan perempuan kurang dilibatkan karena kedudukan perempuan ada pada sektor domestik bukan produktif.

Upaya ini memang dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan namun dalam strategi WID ini konsep kesetaraan gender belum

secara menonjol diadopsi dan gerakan belum diarahkan terhadap struktur dan kultur sosial yang bias gender.

(Handayani, 2008: 38-39)

2. Pendekatan WAD (*Women and Development*)

Tahun 1980 muncul konsep *Women and Development* (WAD), konsep ini muncul menggantikan WID karena pendekatan WID menekankan terintegrasinya perempuan dalam pembangunan, maka dalam WAD lebih mengarah pada hubungan antara perempuan dan proses pembangunan. Jadi setelah WID terimplementasi kemudian beralih pada bagaimana hubungan atau keterkaitan antara perempuan dan proses pembangunan. Dalam WAD, tidak membahas letak kedudukan laki-laki dan perempuan karena sudah ada pemahaman bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan, kesempatan, dan peran yang sejajar.

Implementasi pendekatan WAD dititikberatkan pada pengembangan kegiatan peningkatan pendapatan tanpa memperhatikan unsur waktu yang digunakan oleh perempuan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berada di luar tugas dan tanggung jawab unsur domestik. Kegiatan domestik berada di luar jalur yang sebelumnya perempuan sebagai obyek. Kali ini perempuan menjadi subyek dalam pembangunan. Namun, kesalahan konsep WAD ini adalah tidak memasukkan unsur laki-lakinya.

(Handayani, 2008: 40-41)

3. Pendekatan GAD (*Gender and Development*)

Tahun 1990 dikembangkan konsep *Gender and Development*, konsep ini menggabungkan unsur laki-laki dan perempuan di dalam pembangunan. Pendekatan GAD secara implementatif cenderung mengarah pada adanya komitmen pada perubahan struktural. Oleh sebab itu, pelaksanaan GAD memerlukan dukungan sosial budaya masyarakat dalam politik nasional yang menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki. GAD tidak mungkin terlaksana apabila dalam politik suatu negara masih menempatkan perempuan dalam posisi yang inferior dan subordinatif.

(Handayani, 2008: 41-43)

Dengan demikian kajian tentang gender di dalam pembangunan merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan karena di dalam pembangunan, perempuan juga merupakan subyek yang seharusnya dilibatkan juga baik dalam prosesnya maupun manfaatnya. Sehingga akan tercipta kesetaraan dan keadilan gender yang menjadi hal penting karena dapat menjadi upaya menghilangkan diskriminasi antar laki-laki dan perempuan sehingga perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama untuk dapat berperan secara maksimal baik sebagai pelaku maupun penikmat pembangunan. Seperti yang ditambahkan oleh Mishra Panda (*Gender, Technology and Development* 11 (3), 2007: 2) bahwa :

“...Gender mainstreaming is strategy for making women’s as well as men’s concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring, and evaluation of policies and program in all political, economic, and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality...”

“...Pola pikir gender adalah strategi untuk membuat perempuan sama baiknya dengan kepentingan dan pengalaman laki-laki yang terintegrasikan pada desain, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan dan program di semua bidang politik, ekonomi dan sosial sehingga perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat

yang sama dan ketidakadilan tidak akan abadi. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai persamaan gender...”

b. Teknik Analisis Gender Harvard

Sebagai langkah awal dalam rangka penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender, perlu dilakukan analisis gender. Analisis gender merupakan alat analisis untuk membantu memahami realitas sosial. Di samping itu analisis gender membantu memahami bahwa pokok persoalannya adalah sistem dan struktur yang tidak adil, di mana laki-laki maupun perempuan menjadi korban dan mengalami dehumanisasi karena ketidakadilan gender tersebut.

(Handayani, 2008: 3)

Analisis gender dimulai dengan data dan fakta serta informasi tentang gender yaitu data terpilah antara laki-laki dan perempuan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan analisis gender diharapkan kesenjangan gender dapat diidentifikasi dan dianalisis sehingga dapat ditemukan langkah-langkah pemecahan masalah dengan tepat.

Dalam mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif yaitu Musrenbangkel, penulis menggunakan teknik analisis responsif gender model Harvard. Teknik ini sering disebut *Gender Framework Analysis* (GFA) yaitu suatu analisis yang digunakan untuk melihat profil gender dari suatu kelompok sosial dan peran gender dalam proyek pembangunan, yang mengutarakan perlunya tiga komponen dan interelasi antara satu sama lain yaitu profil aktivitas, akses, dan kontrol. Dalam profil aktivitas perlu dilihat interaksi antara perempuan dan proyek-proyek pembangunan, untuk mengetahui apa yang dikerjakan perempuan. Profil akses dan kontrol didekati

dengan mengidentifikasi kegiatan spesifik gender dalam produksi, reproduksi, dan perawatan.

(Handayani, 2008:170)

Teknik analisis Harvard dimulai dengan mengumpulkan data pada tingkat mikro yaitu masyarakat dan rumah tangga. Kerangka ini sangat luwes (mudah diadaptasikan) dan tersusun atas tiga elemen pokok yaitu :

a. Profil aktivitas

Yang berdasarkan pada pembagian kerja gender (siapa mengerjakan apa, di dalam rumah tangga dan masyarakat), yang memuat daftar tugas perempuan dan laki-laki (laki-laki melakukan apa dan perempuan melakukan apa), sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengelompokkan menurut umur, etnis, kelas sosial tertentu, di mana dan kapan tugas-tugas tersebut dilakukan. Aktivitas dikelompokkan menjadi tiga yaitu produktif, reproduktif (rumah tangga), dan sosial-politik-keagamaan.

b. Profil akses

Siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya produktif yang memuat daftar pertanyaan perempuan mempunyai atau bisa memperoleh sumber daya apa dan lelaki memperoleh apa? Perempuan menikmati apa dan lelaki menikmati apa?

(Handayani, 2008: 171)

c. Profil kontrol

Perempuan mengambil keputusan atau kontrol penggunaan sumber daya apa dan lelaki penentu sumber daya apa? Sumber daya di sini adalah sumber daya

yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Manfaat apa yang diperoleh dari melakukan aktivitas. Sumber daya dapat berupa materi (bernilai ekonomi, politis, sosial, dan waktu), akses terhadap sumber daya dan manfaat, kontrol atas sumber daya dan manfaat dikelompokkan menurut gender, faktor-faktor yang berpengaruh menyangkut hal-hal yang mengakibatkan pada adanya pembagian kerja, adanya profil akses dan kontrol suatu masyarakat tersebut.

(Handayani, 2008: 172)

Teknik analisis ini dirancang sebagai landasan untuk melihat suatu profil gender dari suatu kelompok sosial. Analisis model Harvard ini dimaksudkan untuk :

- a. Membantu para perencana merancang proyek yang lebih efisien dan memperbaiki produktivitas kerja secara menyeluruh.
- b. Mencari informasi lebih rinci sebagai dasar untuk mencapai tujuan efisiensi dengan tingkat keadilan gender yang optimal.
- c. Untuk memetakan pekerjaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan melihat faktor penyebab perbedaan.

Dengan menggunakan teknik analisis ini, elemen-elemen khususnya dalam teknik analisis gender akan memberikan kemudahan penulis untuk melakukan penelitian partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel, karena :

- a. Adanya elemen perbedaan akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat dalam kaitannya dengan tanggung jawab laki-laki dan perempuan.
- b. Adanya perbedaan antara akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat dengan kontrol atas sumber daya dan manfaat.

- c. Adanya pandangan yang lebih luas tentang apa yang dimaksud dengan sumber daya yaitu tidak hanya sumber daya yang bersifat material tetapi juga yang susah dinilai secara ekonomi seperti ketrampilan dan organisasi sosial dan yang paling penting terutama untuk perempuan yaitu sumber daya dan manfaat yang berupa waktu.

(Handayani, 2008: 172)

Dalam perencanaan pembangunan partisipatif melalui mekanisme Musrenbangkel Kalurahan Joyosuran tahun 2010 dapat diketahui seberapa besar partisipasi dari perempuan dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta upaya melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Pentingnya partisipasi perempuan tidak lagi dapat diabaikan karena partisipasi perempuan pada saat ini relatif rendah dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis partisipasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 18 A Tahun 2009.

c. Partisipasi

Dalam hubungannya dengan Pembangunan PBB memberi definisi partisipasi sebagai keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda yaitu :

1. Di dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

2. Pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela
3. Pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau suatu proyek.

Menurut FAO (1989) partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan; partisipasi adalah 'pemekaan' pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan; partisipasi adalah suatu proyek aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakannya untuk melakukan hal itu; partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek agar supaya mendapatkan informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial; partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri; dan partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

(Dwi, 2002: 31-32)

Menurut Moeljarto Tjokrowinoto, partisipasi adalah penyertaan mental dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok, yang mendorong mereka untuk menyumbangkan ide, pikiran, dan perasaan yang terciptanya tujuan bersama-sama bertanggung jawab terhadap tujuan tertentu.

(Tjokrowinoto, 1978: 29)

Moeljarto Tjokrowinoto lebih menitikberatkan pada emosi seseorang dan agaknya kurang memperhatikan segi fisik. Hal ini mungkin belum tentu dapat berlaku bagi kelompok yang berorientasi pada pemimpin.

Dusseldorp mencoba membuat klasifikasi dari berbagai tipe partisipasi.

Klasifikasinya didasarkan pada 9 dasar, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan derajat kesukarelaan

a. Partisipasi bebas

Terjadi bila seorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu. Partisipasi bebas dapat dibedakan menjadi :

a.1. Partisipasi spontan

Terjadi bila seseorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan-ajakan oleh lembaga-lembaga atau orang lain.

a.2. Partisipasi terbujuk

Bila seorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui program penyuluhan atau oleh pengaruh lain sehingga berpartisipasi secara sukarela di dalam aktivitas kelompok tertentu. Partisipasi ini dapat dibagi menurut siapa yang membujuk, yakni :

- i Pemerintah yang mempropagandakan program pembangunan masyarakat, gerakan koperasi, LSM/LPSM atau KHTI.
- ii Badan-badan sukarela di luar masyarakat itu misalnya gerakan-gerakan keagamaan.
- iii Orang-orang yang tinggal di dalam masyarakat atau

golongan organisasi sukarela yang berbasiskan di dalam masyarakat seperti PKK, Kelompok Tani, dan sebagainya.

b. Partisipasi terpaksa

Dapat terjadi dalam berbagai cara :

b.1. Partisipasi terpaksa oleh hukum

Terjadi bila orang-orang terpaksa melalui peraturan atau hukum, berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan keyakinan mereka dan tanpa melalui persetujuan mereka.

b.2. Partisipasi terpaksa karena keadaan kondisi sosial ekonomi

2. Berdasarkan cara keterlibatan

a. Partisipasi langsung

Terjadi bila diri orang itu melaksanakan kegiatan tertentu di dalam proses partisipasi seperti misalnya mengambil peranan di dalam pertemuan-pertemuan, turut diskusi.

b. Partisipasi tidak langsung

Terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya, misalnya pemilihan wakil-wakil di dalam DPR.

3. Berdasarkan tingkatan di dalam berbagai tahap dalam proses

pembangunan terencana

a. Partisipasi lengkap

Bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam seluruh enam tahap dari proses pembangunan terencana.

b. Partisipasi sebagian

Bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam seluruh enam tahap itu.

4. Berdasarkan tingkatan organisasi

Dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Partisipasi yang tidak terorganisasi

Terjadi bila suatu struktur organisasi dan seperangkat tata kerja dikembangkan atau sedang dalam proses penyiapan.

b. Partisipasi yang terorganisasi.

Terjadi bila orang-orang berpartisipasi hanya dalam tempo yang kadang-kadang saja yang hukumnya karena keadaan yang gawat, misalnya sewaktu terjadi kebakaran.

5. Berdasarkan intensitas dan frekuensi kegiatan

a. Partisipasi intensif

Terjadi bila di situ ada frekuensi aktivitas kegiatan partisipasi yang tinggi. Menurut Muller hal ini diukur melalui dimensi kuantitatif dari partisipasi.

b. Partisipasi ekstensif

Terjadi bila pertemuan-pertemuan diselenggarakan secara tidak teratur dan kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang membutuhkan partisipasi dalam interval waktu yang panjang.

6. Berdasarkan lingkup liputan kegiatan

a. Partisipasi terbatas

Yaitu bila seluruh kekuatan yang mempengaruhi komunitas tertentu dapat diwakili oleh dan dijadikan sasaran kegiatan yang membutuhkan partisipasi anggota komunitas tertentu.

b. Partisipasi tak terbatas

Terjadi bila hanya sebagian kegiatan sosial, politik, administratif, dan lingkungan fisik yang dapat dipengaruhi melalui kegiatan partisipatif.

7. Berdasarkan efektifitas

a. Partisipasi efektif

Yaitu kegiatan-kegiatan partisipatif yang telah menghasilkan perwujudan seluruh tujuan yang mengusahakan aktivitas partisipasi.

b. Partisipasi tidak efektif

Terjadi bila tidak satupun atau sejumlah kecil saja dari tujuan-tujuan aktivitas yang dicanangkannya terwujud.

8. Berdasarkan siapa yang terlibat

Orang-orang yang dapat berpartisipasi dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Anggota masyarakat setempat : penduduk setempat, pemimpin setempat.
- b. Pegawai pemerintah : penduduk dalam masyarakat, bukan penduduk.
- c. Orang-orang luar : penduduk dalam masyarakat, bukan penduduk
- d. Wakil-wakil masyarakat yang terpilih.

Anggota-anggota dari berbagai kategori dapat diorganisir (partisipasi bujukan) atau dapat mengorganisir mereka berdasarkan dua prinsip, yaitu :

1. Perwilayahan, sifatnya homogen sejauh masih menyangkut kepentingan-kepentingan tertentu.
 2. Kelompok-kelompok sasaran, sifatnya homogen, sejauh menyangkut kepentingan-kepentingan tertentu.
9. Berdasarkan gaya partisipasi

Rothman membedakan tiga model praktek organisasi masyarakat di dalam setiap model terdapat perbedaan tujuan-tujuan yang dikejar dan perbedaan dalam gaya partisipasi.

a. Pembangunan lokalitas

Model praktek organisasi ini sama dengan masyarakat dan maksudnya adalah melibatkan orang-orang di dalam pembangunan maksudnya adalah melibatkan orang-orang di dalam pembangunan mereka sendiri dan dengan cara ini menumbuhkan energi sosial yang dapat mengarah pada kegiatan menolong diri sendiri. Model ini mencoba melibatkan seluruh anggota masyarakat serta mempunyai fungsi integratif.

b. Perencanaan sosial

Pemerintah telah merumuskan tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu yang berkenaan dengan perumahan, kesehatan fisik dan lain sebagainya. Tujuan utama melibatkan orang-orang adalah untuk mencocokkan sebesar mungkin terhadap kebutuhan yang dirasakan dan membuat program lebih efektif. Partisipasi di dalam perencanaan sosial dapat dicirikan seperti

disebutkan oleh *Arstein* sebagai informan atau *placation*. Akan tetapi juga bahwa partisipasi berkembang ke dalam bentuk *partnership* atau perwakilan kekuasaan.

c. Aksi sosial

Tujuan utama dari tipe partisipasi ini adalah memindahkan hubungan-hubungan kekuasaan dan pencapaian terhadap sumber-sumber perhatian utama ada satu bagian dari masyarakat yang kurang beruntung. Seperti halnya dalam pembangunan lokalitas, peningkatan partisipasi diantaranya kelompok sasaran adalah salah satu dari maksud-maksud yang penting.

(Slamet, 1993: 10-21)

d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

Dasar hukum keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah dijamin dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang meletakkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan rasa memiliki masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah, menjamin adanya transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan umum, perumusan program dan pelayanan umum yang memenuhi aspirasi masyarakat.

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, melembagakan Musrenbang di semua tingkatan pemerintahan dan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Di dalamnya juga terkandung pentingnya sinkronisasi lima pendekatan perencanaan yaitu,

pendekatan politik, partisipatif, teknokratis, *bottom-up*, dan *top-down* dalam perencanaan pembangunan daerah.

Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri tentang petunjuk teknis Penyelenggaraan Musrenbang, mengatur titik masuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Surat edaran bersama ini juga berisi pedoman tata cara, capaian, prosedur, proses, dan mekanisme penyelenggaraan musrenbang dan forum pemangku kepentingan SKPD.

Dengan kerangka legal di atas, pemerintah telah menciptakan kerangka bagi Musrenbang untuk dapat mensinkronisasikan perencanaan *bottom-up* dan *top-down* dan merekonsiliasi berbagai kepentingan dan kebutuhan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 18 A tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Mekanisme Musrenbangkel dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu Pra Musrenbangkel dan Musrenbangkel. Adapun petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbangkel tahun 2010 sebagai berikut :

1. Organisasi Penyelenggara

Musrenbangkel diselenggarakan oleh Panitia *Ad Hoc* yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah, pada tahapan persiapan pelaksanaan Musrenbang. Panitia Musrenbangkel terdiri dari :

a. Panitia Pengarah (*Steering Committee/ SC*)

a.1. Susunan Keanggotaan

Susunan Keanggotaan Panitia Pengarah (SC) terdiri dari unsur pimpinan LPMK, unsur tokoh masyarakat dan unsur pemerintah kelurahan. Diupayakan keterwakilan perempuan minimal **30 %** dari jumlah keanggotaan panitia.

a.2. Tugas dan Fungsi Panitia Pengarah

Panitia Pengarah mempunyai tugas dan fungsi

untuk :

- 1) Mengikuti pelaksanaan agenda persiapan Musrenbang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- 2) Menyusun dan menetapkan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbangkel.
- 3) Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah di tingkat RT/RW dan komunitas di tingkat kelurahan.
- 4) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat Musrenbangkel paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan Musrenbangkel dilaksanakan.
- 5) Menerima pendaftaran dan atau mengundang peserta Musrenbangkel.
- 6) Mengarahkan proses Musrenbangkel agar pelaksanaannya berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

- 7) Memimpin Sidang Pleno Musrenbangkel.
- 8) Menyerahkan hasil Musrenbangkel kepada Panitia Pelaksana.

b. Panitia Pelaksana (*Organizing Committee/ OC*).

b.1. Susunan Keanggotaan

Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana (OC) terdiri dari anggota masyarakat selain yang telah duduk di Panitia Pengarah (*Steering Committee*). Diupayakan keterwakilan perempuan sebesar 30 % dari jumlah panitia.

b.2. Tugas dan Fungsi Panitia Pengarah

Panitia Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan proses Musrenbangkel sesuai dengan arahan Panitia Pengarah.

2. Narasumber

a. Unsur Narasumber

Narasumber terdiri dari : Lurah (selaku kepala wilayah dan kepala SKPD), pimpinan LPMK, Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Pejabat Instansi yang ada di Kelurahan, Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan tersebut.

b. Tugas Narasumber

1. Menyampaikan dan memberikan informasi yang perlu diketahui peserta sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan Musrenbangkel, meliputi potensi kelurahan, analisa prioritas permasalahan, dan evaluasi pembangunan kelurahan tahun sebelumnya.
2. Lurah selain menyampaikan hal yang sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga menyampaikan program/ kegiatan prioritas dari Rancangan Renja SKPD Kelurahan (khususnya Belanja Langsung kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah).

3. Fasilitasi

- a. Pelaksana fungsi fasilitasi (fasilitator) adalah LPMK dan pihak-pihak lain yang ditetapkan oleh Lurah.
- b. Tugas Fasilitator
Fasilitator bertugas untuk :
 1. Membantu Panitia Musrenbangkel.
 2. Memfasilitasi dan memberikan asistensi kepada masyarakat dan peserta sidang dalam proses pelaksanaan Musrenbangkel.
 3. Membantu kelancaran proses Musrenbangkel dari Pra Musrenbangkel sampai dengan Musrenbangkel.

4. Pendampingan

Pendampingan untuk tahapan pelaksanaan Musrenbang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, dengan kegiatan antara lain :

- a. Memberikan penjelasan hal-hal yang diperlukan terkait pelaksanaan Musrenbang.
- b. Melakukan monitoring.

5. Peserta

- a. Peserta Pra Musrenbangkel

Peserta Pra Musrenbangkel terdiri dari unsur :

- i. Panitia
- ii. Pengurus LPMK
- iii. Pemerintah Kelurahan
- iv. Perwakilan Pengurus RT/RW
- v. Sektor privat
- vi. Tokoh Agama
- vii. Tokoh Masyarakat
- viii. Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan tingkat kelurahan
(pemuda, perempuan, dan lainnya).
- ix. Masyarakat yang paham/ ahli terhadap permasalahan kelurahan.

- b. Peserta Musrenbangkel

Peserta Musrenbangkel terdiri dari unsur :

- i. Pemerintah Kelurahan
- ii. LPMK
- iii. Unsur pengurus RT dan RW (utusan yang mewakili

unsur ini dibekali surat tugas serta berita acara hasil musyawarah perencanaan pembangunan setempat).

- iv. Tokoh masyarakat/agama.
 - v. Wakil Organisasi Sosial/ Kesenian/ Olah Raga/ Kerohanian/ Pemuda/ Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya di tingkat Kelurahan.
 - vi. Sektor Privat
 - vii. Kelompok masyarakat yang terdapat di Kelurahan.
- c. Keterwakilan unsur perempuan diupayakan 30 % dari jumlah peserta.

6. Delegasi Musrenbangkel

- a. Delegasi Musrenbangkel ke Musrenbangcam, dipilih dalam Musrenbangkel dan disahkan oleh Pimpinan Sidang Pleno sebanyak-banyaknya tujuh (7) orang (diupayakan keterwakilan perempuan sebesar 30 % dari jumlah delegasi), terdiri dari :
 - 1. Unsur Pimpinan Sidang Pleno (SC)
 - 2. Perwakilan Sidang Komisi
 - 3. Ketua Tim Penyempurna Rumusan
- b. Tugas Delegasi Musrenbangkel :
 - 1. Mewakili kelurahan dalam Musrenbangcam.
 - 2. Mengikuti Musrenbangcam.

3. Memaparkan prioritas kegiatan pembangunan kelurahan pada forum Musrenbangcam.

7. Mekanisme Musrenbangkel

a. Pra Musrenbangkel

Dalam Pra Musrenbangkel dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana Musrenbangkel dibantu fasilitator kelurahan. Prosesnya diawali dengan Pembentukan panitia Musrenbangkel (*Steering Committee*) dan (*Organizing Committee*). Dalam Pra Musrenbangkel dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Membagi tugas panitia Musrenbangkel.
- 2) Menyusun/merevisi konsep tata tertib Musrenbangkel.
- 3) Melakukan sosialisasi dan menyusun jadwal musyawarah RT/RW.
- 4) Menetapkan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbangkel.
- 5) Menyusun anggaran Musrenbangkel.
- 6) Musyawarah tingkat RT/RW yang melibatkan semua komponen masyarakat.
- 7) Mengumpulkan rumusan kegiatan prioritas dari RT/RW dan kelompok masyarakat, masing-masing sebanyak-banyaknya 5
- 8) Penyampaian hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan DPK tahun sebelumnya oleh Tim Monev.
- 9) Penyampaian evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan

tahun berkenaan serta perencanaan tahun berikutnya
Program PNPM Mandiri oleh Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM).

10) Analisa permasalahan, potensi dan penetapan sasaran
pembangunan tahunan Kelurahan.

11) Penyusunan prioritas Musrenbangkel terdiri dari :

a. Rumusan kegiatan pembangunan untuk diusulkan ke
Musrenbangcam dan akan dilaksanakan oleh SKPD.

b. Prioritas kegiatan pembangunan kelurahan yang akan
didanai oleh :

i. Alokasi anggaran dalam SKPD Kelurahan
(sesuai pelimpahan sebagian kewenangan
Walikota kepada Lurah).

ii. Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dan atau swadaya
masyarakat.

iii. BLM PNPM Mandiri didukung swadaya
Masyarakat.

iv. Sumber dana lainnya selain dana sebagaimana
dimaksud pada angka i, ii, iii.

12) Penyampaian prioritas pembangunan tahun berikutnya
(dalam bentuk naskah) oleh BAPPEDA, 3 hari sebelum
pelaksanaan Musrenbangkel.

13) Mengumumkan jadwal Musrenbangkel 4 hari sebelum

pelaksanaan.

14) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta

Musrenbangkel.

Keluaran (output) dari Pra-Musrenbangkel adalah bahan Musrenbangkel (Isian rencana kegiatan pada : Form IV A, Form IV B, Form IV C, dan Form IV D), termasuk di dalamnya rancangan kegiatan unggulan Kelurahan.

b. Musrenbangkel

Musrenbangkel diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana. Penyelenggaraan Musrenbangkel diupayakan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan peserta perempuan dapat terlibat secara optimal. Persidangan dalam Musrenbangkel meliputi :

1. Sidang Pleno I

Dalam sidang pleno I dilakukan kegiatan :

- a) Pemilihan pimpinan sidang dipimpin oleh *Steering Commiittee*
- b) Pemilihan pimpinan sidang dipimpin oleh *Steering Commiitte*
- c) Pengesahan tata tertib
- d) Paparan prioritas program atau kegiatan pembangunan di kecamatan dan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya oleh Camat atau Pemerintah Kecamatan.
- e) Paparan prioritas program atau kegiatan kelurahan tahun berikutnya beserta informasi perkiraan jumlah alokasi Dana

- f) Bantuan Pembangunan Kelurahan (*blockgrant*) oleh Lurah.
- g) Paparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan oleh beberapa perwakilan masyarakat (misalnya Ketua RW, Komite Sekolah, Ketua Kelompok Usaha, dan lain-lain).
- h) Penetapan tata cara penyeleksian prioritas kegiatan.

2. Sidang Komisi

Dalam sidang komisi dilakukan kegiatan penyusunan, validasi, dan rekapitulasi :

- a. DSP kegiatan yang akan didanai dengan alokasi anggaran dalam SKPD Kelurahan (sesuai pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Lurah), Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dan atau Swadaya Masyarakat, BLM PNPM Mandiri didukung swadaya masyarakat serta sumber dana lainnya.
- b. Rumusan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan pada Musrenbangcam untuk ditangani SKPD.

3. Sidang Pleno II

Dalam sidang pleno II dilakukan kegiatan :

- a. Paparan hasil sidang komisi.
- b. Tanggapan.
- c. Penetapan kegiatan unggulan kelurahan
- d. Pengesahan hasil sidang pleno II.

- e. Pembentukan Tim Penyempurna Rumusan
- f. Penentuan delegasi ke Musrenbangcam sebanyak-banyaknya tujuh orang yang terdiri dari :
 - i. Pimpinan Sidang Pleno
 - ii. Perwakilan Sidang Komisi
 - iii. Ketua Tim Penyempurna Rumusan
- g. Pembentukan Tim Perencana Kegiatan Pembangunan, Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan tahun berikutnya
- h. Penandatanganan Berita Acara hasil-hasil Musrenbangkel diwakili oleh Pimpinan Sidang Pleno dan Ketua Sidang Komisi.
- i. Penyerahan hasil Musrenbangkel kepada Panitia Pengarah untuk diteruskan kepada Panitia Pelaksana

4. Pimpinan Sidang

Pimpinan sidang terdiri dari Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi.

a. Pimpinan Sidang Pleno

Pimpinan Sidang Pleno adalah Steering Committee, kecuali forum berkehendak/sepakat untuk memilih pimpinan sidang secara langsung dari peserta Musrenbangkel. Pimpinan Sidang Pleno terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Sedangkan tugas pimpinan sidang pleno antara lain memimpin sidang pleno, mengesahkan tata tertib, memimpin

pemilihan pimpinan sidang komisi, mengesahkan hasil keputusan sidang, menyerahkan hasil Musrenbangkel kepada panitia pelaksana, menetapkan delegasi Musrenbangkel untuk mengikuti Musrenbangcam, menetapkan Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan, Menetapkan Pembentukan Tim Perencana Kegiatan Pembangunan, Tim Pelaksanan Kegiatan Pembangunan dan Tim Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan tahun berikutnya, menyusun berita acara hasil Musrenbangkel yang minimal memuat daftar prioritas kegiatan yang disepakati dan daftar nama delegasi yang terpilih, serta mengesahkan berita acara Musrenbangkel.

b. Pimpinan Sidang Komisi

Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Adapun tugas pimpinan sidang komisi yaitu memimpin sidang komisi, memfasilitasi perumusana dan validasi dalam rangka penyusunan DSP dan rumusan kegiatan pembangunan, menetapkan hasil sidang komisi.

5. **Keluaran (*output*)**

Keluaran (*output*) dari Musrenbangkel adalah

1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan yang berisi :
 - a. Rumusan Kegiatan pembangunan untuk diusulkan ke Musrenbangcam dan akan dilaksanakan oleh SKPD (Form IV A)
 - b. DSP kegiatan pembangunan skala kelurahan yang akan didanai oleh alokasi dalam SKPD kelurahan

(sesuai pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Lurah)

(Form IV B)

- c. DSP kegiatan pembangunan skala kelurahan yang akan didanai oleh alokasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) (Form IV C)
- d. DSP kegiatan pembangunan skala kelurahan yang akan didanai oleh alokasi BLM PNPM Mandiri (Form IV D)
- e. Prioritas kegiatan pembangunan kelurahan yang akan diusulkan untuk didanai dengan sumber dana lainnya selain dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d (Form IV E)

2. Daftar delegasi untuk mengikuti Musrenbangcam

3. Susunan Keanggotaan Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan

4. Susunan Keanggotaan Tim Perencana kegiatan Pembangunan

5. Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan

6. Susunan keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

7. Berita Acara Musrenbangkel

8. Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan

Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan ditetapkan dalam sidang pleno Musrenbangkel. Tugas utama Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan adalah menyempurnakan rumusan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangkel meliputi editing bahasa, sinkronisasi kegiatan dan penyempurnaan naskah. Anggota Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan terdiri dari unsur ; Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi, LPMK, dan unsur pemerintah kelurahan.

9. Tim Perencana Kegiatan Pembangunan

Tim Perencana Kegiatan Pembangunan ditetapkan dalam sidang pleno Musrenbangkel. Tugas utama Tim Perencana Kegiatan Pembangunan adalah merencanakan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangkel yang akan dibiayai dengan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dan atau swadaya masyarakat. Anggota tim Perencana Kegiatan Pembangunan terdiri dari unsur ; masyarakat terkait, selain yang telah duduk di tim Perencana Kegiatan Pembangunan dan tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan, LPMK, dan unsur pemerintah kelurahan. Keterwakilan unsur perempuan dalam tim diupayakan sebesar 30 %.

10. Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan

Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan ditetapkan dalam sidang pleno Musrenbangkel. Tugas tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan antara lain ; melaksanakan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangkel berdasarkan rencana kegiatan yang ditetapkan oleh tim Perencana Kegiatan Pembangunan, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada Lurah. Anggota Tim Pelaksana

Kegiatan Pembangunan terdiri dari unsur ; masyarakat terkait, selain yang telah duduk di Tim Perencana Kegiatan Pembangunan dan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan, *Stakeholder* pembangunan kelurahan. Keterwakilan unsur perempuan dalam tim diupayakan sebesar 30 %.

11. Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan

Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan ditetapkan dalam sidang pleno Musrenbangkel. Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan antara lain ; melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sejak ditetapkan hingga pelaksanaan DPK hasil Musrenbang selesai, mengawasi pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbangkel yang akan dibiayai dengan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK), yang rencana kegiatannya ditetapkan oleh Tim Perencana Kegiatan Pembangunan, menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbangkel yang akan dibiayai dengan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK), melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Lurah.

Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan terdiri dari unsur ; LPMK, pemerintah Kelurahan, masyarakat terkait selain yang telah duduk di Tim Perencana Kegiatan Pembangunan dan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan, stakeholder pembangunan kelurahan (orang yang paham terhadap obyek monitoring dan evaluasi). Keterwakilan unsur perempuan dalam tim diupayakan sebesar 30 %.

12. Jadwal Penyelenggaraan

Musrenbangkel dilaksanakan selambat-lambatnya pada awal bulan Februari 2010.

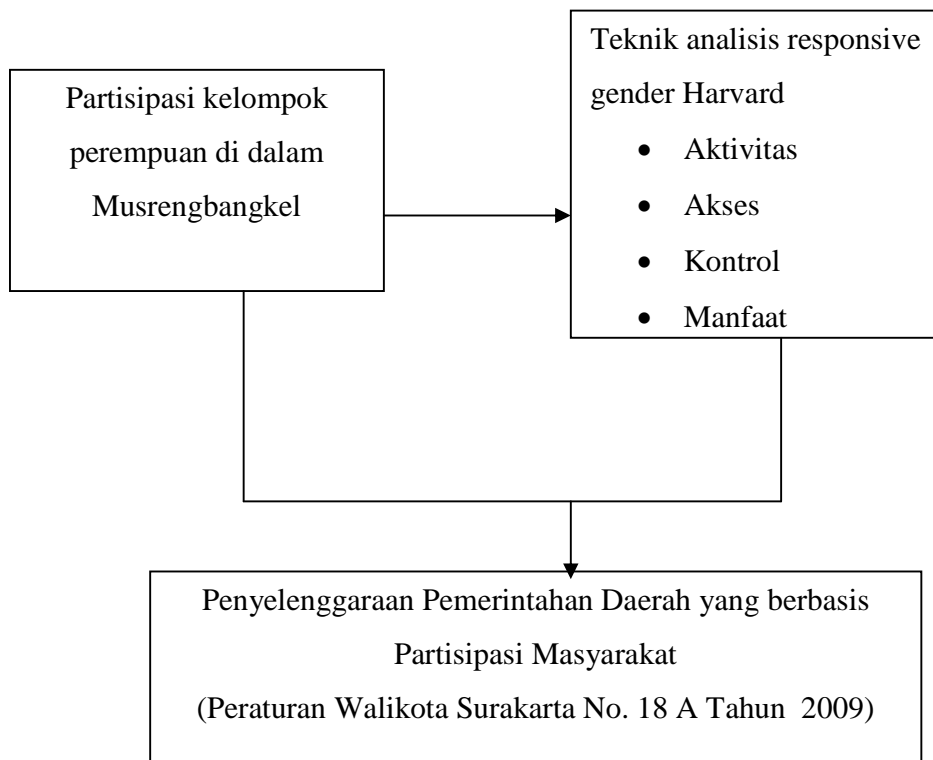
Bagan 1.1
Bagan Mekanisme Musrenbangkel 2010

2. Kerangka Berfikir

Dalam perencanaan pembangunan partisipatif melalui mekanisme Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010 dapat diketahui seberapa besar partisipasi kelompok perempuan dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta upaya melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilihat dari profil gender suatu kelompok sosial dan peran gender dengan melihat interrelasi komponen-komponen di dalamnya yaitu profil aktivitas, kontrol, akses, dan manfaat. Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis masyarakat melalui Musrenbang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota.

Untuk lebih jelasnya dapat dicermati dalam bagan kerangka berfikir.

Bagan 1.2
Kerangka Berfikir



F. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Partisipasi

Partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik seseorang atau kelompok masyarakat secara sadar dalam usaha mendorong mereka untuk menyumbangkan ide, pikiran, dan perasaan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara merencanakan, melaksanakan, menggunakan dan disertai tanggung jawab. Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah pihak perempuan, sebagaimana partisipasi perempuan dalam Musrenbang di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

2. Perempuan

Perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan dimana secara kodrati. Di negara Indonesia dalam ranah publik perempuan dianggap makhluk nomor dua (*second person*), sehingga partisipasi perempuan dalam Musrenbang masih rendah.

3. Musrenbang

Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu untuk mengetahui sejauh mana partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Penggunaan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif mampu mengungkap berbagai informasi kualitatif yang lebih berharga daripada sekedar pernyataan jumlah atau frekuensi dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif lebih banyak

mementingkan segi "Proses" dari pada "Hasil". Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

(Moleong, 1998: 6-8).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Lokasinya terletak di bagian Utara Kota Surakarta dengan karakteristik ; cukup dinamis, daerah padat penduduk, merupakan daerah rawan banjir di beberapa RW, daerah epidemi Demam Berdarah, kasus gizi buruk, rumah tidak layak huni. Intensitas kegiatan perempuan di dalam lembaga maupun kegiatan sosial kemasyarakatan cukup tinggi, terdapat ketua RT dan RW perempuan.

3. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari keterangan langsung informan yang ditunjuk oleh penulis. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan sumber (*key informan*) perempuan yang pernah diundang dalam kegiatan proses pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif yaitu aparat kelurahan, pengurus LPMK, pengurus RT, pengurus RW, pengurus kelompok perempuan yang ada, dan panitia penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang dimanfaatkan oleh peneliti yang berupa dokumen, arsip – arsip yang dicatat oleh institusi, laporan-laporan dan data-data lain sebagai pelengkap informasi yang dibutuhkan yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini , teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* (sampel bertujuan) yaitu sampel yang ditarik dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian. Dan sifat pengambilan sampel dalam penelitian ini juga dikatakan “ *criterion selection* “. Artinya dalam penelitian ini, peneliti akan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber yang mantap.

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah :

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari subyek penelitian dari seluruh lokasi penelitian, yang menjadi populasi adalah perempuan yang ada di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

b. Sampel

Sampel adalah subset atau bagian dari populasi, di mana bagian tersebut harus mewakili populasi dan informasi yang dikumpulkan akan ideal seperti data yang dikumpulkan dalam populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah perempuan-perempuan yang menjadi anggota kelompok-kelompok yang ada di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Kelompok-kelompok tersebut antara lain PKK, Posyandu, Kelompok Tani.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Teknik observasi atau teknik pengamatan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan mata untuk melihat secara langsung kejadian-kejadian yang berhubungan, dengan tujuan penelitian kemudian kejadian-kejadian itu kita catat secara sistematis. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung dan pencatatan proses, kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) Joyosuran.

b. Wawancara (*interview*)

Sebelum mengadakan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang diperlukan maka digunakan pembicaraan informal terlebih dahulu dengan tujuan menciptakan hubungan yang akrab antara peneliti dengan informan. Pada wawancara mendalam digunakan pedoman wawancara berupa garis besar pokok pertanyaan yang dinyatakan dalam proses wawancara dan disusun sebelum wawancara dimulai. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*).

c. Studi Kepustakaan.

Yaitu studi kepustakaan yang dilakukan sebelum kelapangan untuk mengumpulkan data sekunder berkenaan dengan masalah yang diteliti. Studi ini

dilaksanakan dengan cara mengkaji buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji penulis yaitu tentang partisipasi perempuan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian terhadap benda-benda tertulis atau dokumen yang digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian. Penggunaan dokumentasi ini sebagai upaya untuk menunjang data-data yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara. Seperti dengan mempelajari peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Selain itu juga mengkaji susunan panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Joyosuran.

6. Validitas Data

Agar data yang disajikan dalam penelitian memiliki tingkat kebenaran yang tinggi, maka perlu dilakukan validitas data. Dalam penelitian ini, validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Lebih lanjut Patton (1984) menjelaskan bahwa ada empat macam triangulasi yaitu :

- a. Triangulasi data, di mana peneliti mengumpulkan data semacam yang dilakukan oleh beberapa orang peneliti.

- b. Triangulasi investigator yaitu mengumpulkan data semacam yang dilakukan oleh beberapa orang peneliti.
- c. Triangulasi metodologi yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda ataupun dengan mengumpulkan data sejenis tapi menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.
- d. Triangulasi teoritik yaitu melakukan penelitian tentang topik yang sama dan datanya dianalisis dengan menggunakan beberapa perspektif realitas yang berbeda.

(Sutopo, 2002: 78)

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi data di mana peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama guna mendapatkan kebenaran data.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis data model interaktif, dengan tiga komponennya yaitu

a. Reduksi Data

Proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi kasar yang ada di dalam *field note*, dilakukan selama penelitian berlangsung. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, seperti seleksi ketat, ringkasan dan menggolongkan dalam satu pola yang lebih luas.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dalam penyajian data penulis akan lebih mudah memahami apa yang

sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisa/mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian data.

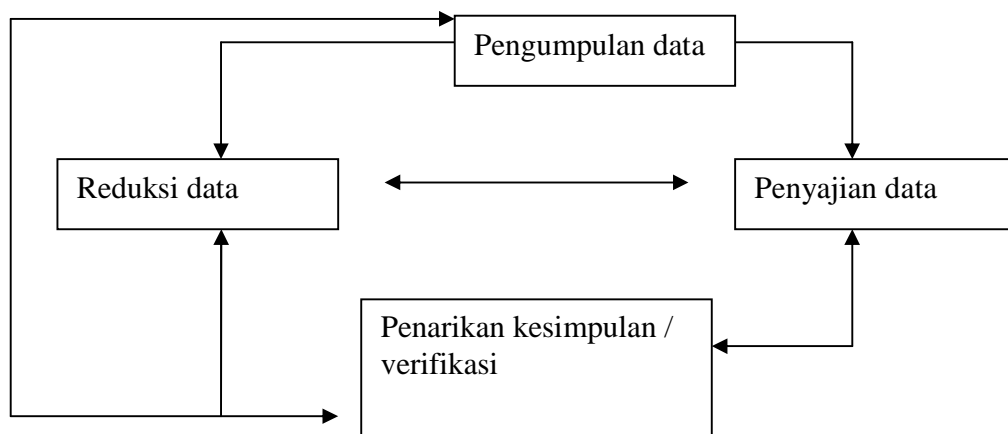
c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Merupakan proses konklusi-konklusi yang terjadi selama pengumpulan data dari awal sampai proses pengumpulan data berakhir, kesimpulan yang perlu diklarifikasi dapat berupa pengulangan yang meluncur cepat sebagai pemikiran kedua yang timbul melintas dalam pikiran penulis pada waktu menulis dengan melihat kembali *field note*.

(Sutopo,1988 : 34)

Untuk lebih jelasnya berikut ini bagan analisis datanya :

Bagan 1.3
Model Analisis Interaktif



BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. KEADAAN GEOGRAFIS

1. Lokasi Penelitian

Kelurahan Joyosuran merupakan salah satu kelurahan dari 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Kelurahan Joyosuran terkenal dengan "pasar besi" yang ada di kampung Kusumodilagan. Wilayah kelurahan Joyosuran terletak di sebelah Utara Kota Surakarta. Jarak ke pusat pemerintahan Kecamatan Pasar Kliwon sekitar 1,25 km persegi.

Joyosuran adalah sebuah kelurahan yang namanya diambil berdasarkan nama jabatan. Tempat ini dulunya merupakan tempat tinggal *abdi dalem* (para pegawai keraton) yang mempunyai tugas atau jabatan sama. Yang terdiri dari para prajurit, pejabat, pengrajin, pemelihara binatang dan sebagainya. (Radjiman, 1984). Kelurahan

Joyosuran terdiri dari 8 kampung, 12 RW dan 55 RT. Adapun kampung-kampung yang ada di Kelurahan Joyosuran adalah sebagai berikut :

- a. Menangan meliputi wilayah RW I
 - b. Tempen meliputi wilayah RW III dan II
 - c. Gabudan meliputi wilayah RW VIII dan sebagian RW IX (RT 01 dan RT 02)
 - d. Iroranan meliputi wilayah sebagian RW IX (RT 03 dan RT 04)
 - e. Kusumodilagan meliputi wilayah RW X, XI, dan XII
 - f. Sastronegaran
 - g. Rejoniten
 - h. Harjodipuran meliputi wilayah RW IV
2. Batas Wilayah

Adapun batas wilayah Kelurahan Joyosuran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Batas Wilayah Kelurahan Joyosuran

Batas	Kecamatan
Sebelah Utara	Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Jebres
Sebelah Selatan	Kecamatan Serengan dan Kabupaten Sukoharjo
Sebelah Timur	Kabupaten Sukoharjo
Sebelah Barat	Kecamatan Serengan dan Kecamatan Banjarsari

Sumber : Monografi Kelurahan Joyosuran 2009

3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kelurahan Joyosuran adalah 54 Ha, di mana sekitar 40 Ha (74 %) merupakan tanah pekarangan bangunan. Sisanya adalah untuk lain-lain.

B. KEADAAN PENDUDUK

1. Jumlah penduduk

Dilihat dari modal dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar merupakan sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi kelancaran pembangunan sebuah masyarakat kelurahan. Pertambahan penduduk di satu pihak sebagai suplai tenaga kerja dihadapkan dengan terbatasnya jumlah lahan menyebabkan meningkatnya tekanan atas pemukiman dan menimbulkan permasalahan dalam penyediaan pemukiman yang layak di Kelurahan Joyosuran.

Menurut data Monografi Kelurahan Joyosuran Tahun 2009, jumlah penduduk Kelurahan Joyosuran adalah 11.449 jiwa, terdiri dari 5.578 orang laki-laki dan 5.871 orang perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 2772.

2. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin ini dapat dipergunakan untuk mengetahui jumlah penduduk usia produktif, non produktif dan belum produktif. Selain itu juga dapat menjadi petunjuk bagi kemungkinan perkembangan penduduk di masa yang akan datang. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin Kelurahan Joyosuran dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok umur (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	368	371	739
1-5	483	410	893
5-9	274	441	715
10-14	290	557	847
15-19	831	805	1636
20-29	846	557	1403
30-39	726	977	1703
40-49	854	797	1651
50-59	845	802	1647
60-	61	154	215
Jumlah	5.578	5.871	11.449

Sumber : Monografi Kalurahan Joyosuran 2009

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbesar adalah jumlah penduduk usia produktif adalah 7236 (63,2%). Jumlah penduduk perempuannya lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

3. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Pada bagian ini menjelaskan mengenai mata pencaharian penduduk Kelurahan Joyosuran serta akumulasi jumlah penduduk dengan mata pencaharian yang disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
Petani sendiri	0
Buruh tani	0
Nelayan	0
Pengusaha	48
Buruh industri	1.403
Buruh Bangunan	599
Pedagang	339
Pengangkutan	120
PNS/TNI	289
Pensiunan	146
Lain-lain	6
Jumlah	2.950

Sumber: Monografi Kalurahan Joyosuran 2009

Berdasarkan data tersebut di atas secara umum mayoritas penduduk Kelurahan Joyosuran adalah buruh industri (47,5%), buruh bangunan (20,3%), pedagang (11,5%) dan lainnya (PNS, pengangkutan, pensiunan, dan pengusaha). Pada umumnya buruh industri yang ada di wilayah Joyosuran adalah industri pondasi cakar ayam, seng. Pemilik industri merupakan orang lokal di mana tenaga kerja yang digunakan adalah mayoritas orang lokal.

4. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Penduduk

Distribusi penduduk Kelurahan Joyosuran Menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tamat Akademi/PT	655
Tamat SLTA	2.865
Tamat SLTP	3.060
Tamat SD	2.990
Tidak tamat SD	74
Belum tamat SD	1.023
Tidak sekolah	20
Jumlah	10.687

Sumber : Monografi Kelurahan Joyosuran 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan di Kelurahan Joyosuran termasuk rendah, hal ini dibuktikan dengan jumlah lulusan paling banyak pendidikan tertinggi adalah lulusan SLTP (28,6%), tamat SD (27,9%), tamat SLTA (26,8%), belum tamat SD (9,6%), sedangkan yang lain tamat Akademi/Perguruan Tinggi (6,1%), tidak tamat SD dan tidak sekolah (0,87%).

5. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Kelurahan Joyosuran terdiri dari berbagai macam etnis suku bangsa, dengan keyakinan masing-masing. Berikut ini adalah data mengenai jumlah pemeluk agama yang terdapat di Kelurahan Joyosuran :

Tabel 2.5
Komposisi Penduduk Menurut Agama

Agama	Jumlah Pemeluk
Islam	7.605
Kristen Katholik	1.858

Kristen Protestan	1.897
Budha	70
Hindu	15
Jumlah	11.445

Sumber : Monografi Kelurahan Joyosuran 2009

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar penduduk Kelurahan Joyosuran beragama Islam (66,4%), sedangkan yang lain Kristen Protestan (16,6%), Kristen Katolik (16,2%), Budha dan Hindu. Mayoritas yang terlibat dalam proses Musrenbangkel adalah warga yang beragama Islam khususnya perempuan.

6. Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Keturunan (WNI)

Di Kelurahan Joyosuran terdapat Warga Negara Indonesia Keturunan Cina sebanyak 292 jiwa sedangkan warga keturunan yang lainnya sebanyak 892 jiwa.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Keturunan

No.	Kebangsaan	Dewasa		Anak	
		L	P	L	P
1.	Cina	84	94	57	57
2.	Lainnya	80	74	667	71
3.	Jumlah	164	168	724	128

Sumber : Monografi Kelurahan Joyosuran 2009

C. SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana Perhubungan

Data mengenai sarana perhubungan yang terdapat di Kelurahan Joyosuran, berikut disampaikan dalam bentuk tabel :

Tabel 2.7
Sarana Perhubungan

Sepeda	650
Sepeda motor	336
Mobil dinas	1

Mobil Pribadi	52
---------------	----

Sumber : Monografi Kelurahan Joyosuran 2009

2. Sarana Komunikasi

Pada bagian ini memaparkan mengenai informasi sarana komunikasi yang digunakan oleh penduduk Kelurahan Joyosuran. Adapun sarana komunikasi yang ada di wilayah Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta berdasarkan data monografi tahun 2009 adalah radio yang berjumlah 150 buah dan televisi sejumlah 1.700.

Dilihat dari sarana komunikasi ini informasi yang diterima dapat lebih cepat sehingga dapat mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan.

3. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang terdapat di Kelurahan Joyosuran terdiri dari beberapa jenis, seperti yang disajikan tabel berikut :

Tabel 2.10
Sarana Kesehatan

Posyandu lansia	3
Posyandu balita	12
Puskesmas Pembantu	1

Sumber : Monografi Kelurahan Joyosuran 2009

Berdasarkan tabel diatas Kelurahan mempunyai 12 posyandu balita dan 3 posyandu lansia.

4. Sarana Pendidikan

Berikut adalah data mengenai sarana pendidikan yang mendukung proses belajar mengajar (pendidikan) penduduk Kelurahan Joyosuran yang tersebar di berbagai wilayah Kelurahan, seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.11
Sarana Pendidikan

TK	4
SD	8
SLTA	1

Sumber : Monografi Kecamatan Pasar Kliwon 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa di Kelurahan Joyosuran terdapat 4 TK , 8 SD, dan 1 SLTA.

D. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN

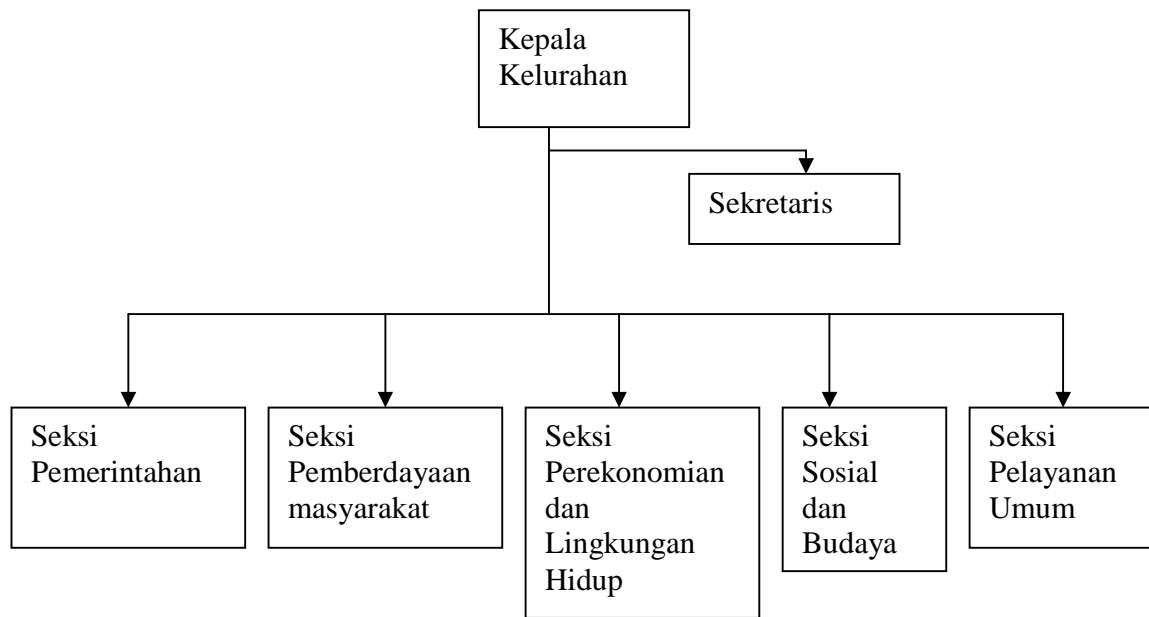
Struktur organisasi pemerintahan merupakan suatu gambaran tentang garis koordinasi ataupun garis komando dalam melaksanakan suatu pemerintahan. Berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 20 I tahun 2009 tentang Pedoman Uraian Tugas Kelurahan Kota Surakarta, susunan organisasi kelurahan di Kota Surakarta mencakup :

1. Lurah
2. Sekretaris
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
5. Seksi Perekonomian dan Lingkungan Hidup
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Seksi Sosial dan Budaya

Kelurahan Joyosuran dipimpin oleh seorang kepala kelurahan (Lurah). Dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatur dan mengendalikan semua jalannya kegiatan pemerintahan, kepala kelurahan dibantu oleh perangkat kelurahan. Perangkat Kelurahan Joyosuran terdiri dari Sekretaris dan 5 seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan

Masyarakat, Seksi Perekonomian & Lingkungan Hidup, Seksi Sosial Budaya, Seksi Pelayanan Umum. Untuk kegiatan Musrenbangkel yang diadakan setiap tahunnya berada di bawah ampuan Seksi Pemerintahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Joyosuran



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini penulis akan menyajikan hasil penelitian beserta dengan pembahasannya.

A. HASIL PENELITIAN

1. Profil Informan

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dihadapi dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang tahu dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti baik lisan maupun tertulis, guna mengetahui partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 secara lebih jelas. Adapun profil dari sembilan (9) informan yang penulis wawancarai adalah sebagai berikut :

a. Ibu Linda Setyowati

Ibu Linda Setyowati merupakan informan pertama yang telah diwawancarai. Beliau berusia 38 tahun. Pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Posisinya sebagai kader Posyandu, kader PKK, dan koordinator kelompok PERMATA (Perempuan Mandiri dan Tertata) di wilayah RW III Kelurahan Joyosuran. Pekerjaan beliau adalah dagang makanan kecil. Dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 sebagai utusan dari RW III, Kelurahan Joyosuran. Kedudukannya dalam proses Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 sebagai anggota Sidang Komisi Ekonomi.

b. Ibu Karsiati

Ibu Karsiati merupakan informan kedua yang telah diwawancarai oleh penulis. Beliau berusia 46 tahun dan berprofesi sebagai tukang pijat. Pendidikan terakhirnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Posisinya sebagai kader Posyandu, kader PKK, ketua RW XII, dan koordinator kelompok PERMADARI (Perempuan Maju dan Mandiri) di wilayah RW XII, Kelurahan Joyosuran. Di dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 Ibu Karsiati sebagai utusan dari PKK Kelurahan dan terpilih menjadi anggota dalam Sidang Komisi Pemerintahan Umum.

c. Ibu Muryanti Sugito

Ibu Muryanti Sugito merupakan informan ketiga yang telah diwawancarai. Beliau berusia 58 tahun. Pendidikan terakhirnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Posisinya sebagai kader Posyandu, kader PKK, dan koordinator kelompok PERMADI (Perempuan Maju dan Mandiri) di wilayah RW IX, Kelurahan Joyosuran. Pekerjaannya adalah menjual makanan seperti soto, gorengan, dan sebagainya. Dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 sebagai utusan dari PKK Kelurahan dan berkedudukan sebagai Anggota Sidang Komisi Sosial Budaya.

d. Ibu Sulastri

Ibu Sulastri merupakan informan keempat yang telah diwawancarai. Beliau berusia 50 tahun. Pendidikan terakhirnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan berprofesi sebagai pemilik usaha katering. Posisinya sebagai kader Posyandu dan kader PKK di RW IV, Kelurahan Joyosuran. Dalam Musrenbangkel

Joyosuran tahun 2010 sebagai utusan dari PKK Kelurahan dan menjadi anggota dalam Sidang Komisi Sosial Budaya.

e. Bapak Atmoyo

Informan kelima yang telah diwawancarai oleh penulis adalah Bapak Atmoyo. Beliau berusia 55 tahun. Pendidikan terakhirnya sampai jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan berprofesi sebagai pekerja swasta di sebuah perusahaan. Posisinya sebagai ketua RT dan kader Posyandu di RW IV, Kelurahan Joyosuran. Dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 sebagai utusan dari RW IV dan berkedudukan anggota dalam Sidang Komisi Infrastruktur.

f. Bapak Sumadiyono

Bapak Sumadiyono adalah informan keenam (6) yang telah diwawancarai oleh penulis. Berusianya 40 tahun dan pendidikan terakhirnya sebagai lulusan sarjana Fakultas Teknik. Berprofesi sebagai wiraswasta yaitu mempunyai usaha persewaan perlengkapan pesta. Sekarang ini menjabat sebagai ketua LPMK Joyosuran. Dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 berkedudukan sebagai narasumber.

g. Bapak Urip Djatmiko

Bapak Urip Djatmiko adalah informan ke tujuh (7) yang diwawancarai oleh penulis, usianya 47 tahun. Profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai Kepala Kelurahan Joyosuran . Pendidikan terakhir adalah S2 Magister Manajemen. Dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 sebagai pelindung dan narasumber.

h. Bapak Bambang Jayanto

Bapak Bambang adalah informan ke delapan (8) yang diwawancarai oleh penulis. Beliau berusia 50 tahun dan berkedudukan sebagai ketua RT dan anggota LINMAS Kelurahan Joyosuran. Pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan berprofesi sebagai pekerja di perusahaan swasta. Dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 sebagai peserta yang merupakan perwakilan dari RW XII.

i. Bapak Jumaerry

Bapak Jumaerry adalah informan ke sembilan (9) yang diwawancarai oleh penulis. Pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Berusia 50 tahun dan berprofesi sebagai karyawan di perusahaan swasta. Posisinya sebagai tokoh masyarakat di RT 02 RW III, Kampung Tempen, Kelurahan Joyosuran. Dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 kedudukannya sebagai ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*).

Berikut ini adalah matriks dari beberapa informan yang telah diwawancarai oleh penulis yaitu :

Matriks 3.1
Profil Informan

No	Nama	Umur	Pendidikan	Posisi	Kedudukan
1	Ibu Linda Setyowati	38	SMK	Kader PKK	Perwakilan RW
2	Ibu Karsiati	46	SLTP	Ketua RW	Perwakilan PKK
3	Ibu Muryanti Sugito	58	SLTA	Kader PKK	Perwakilan PKK
4	Ibu Sulastri	50	SLTA	Kader PKK	Perwakilan PKK
5	Bapak Atmoyo	55	SLTA	Ketua RT	Perwakilan RW

6	Bapak Sumadiyono	40	Sarjana	Ketua LMPK	Narasumber
7	Bapak Urip Djatmiko	47	S2	Kepala kelurahan	Narasumber
8	Bapak Bambang Jayanto	50	SLTA	Ketua RT	Peserta
9	Bapak Jumaerry	50	SLTA	Tokoh masyarakat	Ketua SC

Sumber : Data primer diolah, April 2010

2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) Dalam Perspektif Gender

Musrenbangkel diselenggarakan oleh Panitia *Ad Hoc* yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah, pada tahapan persiapan pelaksanaan Musrenbang. Untuk proses pembentukannya difasilitasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Kepala Kelurahan selaku pelindung penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan.

Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 telah dilaksanakan pada Hari Minggu, 31 Januari 2010 pukul 09.00 - 13.10 WIB bertempat di Balai Pertemuan Kelurahan Joyosuran, Jalan Kapten Mulyadi Nomor 274 Surakarta Kode Pos 57116. Pelaksanaan Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 18 A tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota.

Sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut maka pelaksanaan Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 diselenggarakan dalam dua tahapan, yaitu : Pra

Musrenbangkel dan Musrenbangkel. Untuk masing-masing tahapan pelaksanaan Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010 akan diuraikan dalam penjelasan di bawah ini.

2. 1. Pra Musrenbangkel

2. 1. 1. Peserta Pra Musrenbangkel

Peserta Pra Musrenbangkel terdiri dari berbagai unsur masyarakat Kelurahan Joyosuran. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A tahun 2009. Adapun unsur-unsur masyarakat Kelurahan Joyosuran yang menghadiri Pra Musrenbangkel terdiri dari :

- b. Panitia
- c. Pengurus LPMK
- d. Pemerintah Kelurahan
- e. Pengurus RT/RW
- f. Sektor privat
- g. Tokoh Agama
- h. Tokoh Masyarakat
- i. Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan tingkat Kelurahan (pemuda, perempuan, dan lainnya)

Berdasarkan informasi dan data yang penulis peroleh di lapangan peserta Pra Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 **telah dihadiri oleh semua unsur-unsur masyarakat** seperti yang tertulis pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A tahun 2009.

2. 1. 2. Pelaksanaan dan Hasil Pra Musrenbangkel

Pra Musrenbangkel Joyosuran dilaksanakan pada Hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2010 pukul 19.30 WIB. Dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana Musrenbangkel dibantu oleh fasilitator Kelurahan. Prosesnya diawali dengan pembentukan panitia Musrenbangkel yang terdiri dari *Steering Committee (SC)* dan *Organizing Committee (OC)*.

b. *Steering Committee (SC)*

Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota maka susunan keanggotaan SC terdiri dari unsur pimpinan LPMK, unsur tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah Kelurahan. Diupayakan keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah keanggotaan panitia. Susunan keanggotaan SC dalam Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Ketua : Jumaerry H.M

Sekretaris : Santoso A.P

Anggota : Endro Rusmono, SH, MH, **Krisnandari**, Hariyo Seno, S.H

Dengan adanya keterwakilan satu orang perempuan dalam keanggotaan panitia maka sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A tahun 2009 maka susunan keanggotaan SC dalam Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010 **belum memenuhi persyaratan minimal 30 %.**

c. Organizing Committee (OC).

Untuk susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara (OC) berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota terdiri dari anggota masyarakat selain yang telah duduk di Panitia Pengarah (SC) dengan diupayakan juga keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah panitia. Susunan keanggotaan OC dalam Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010 berdasarkan data dokumentasi adalah sebagai berikut :

Ketua : Agus Anwari

Sekretaris : Drs. Fauziah

Anggota : Jarno, S.H, Hariyoseno, S.H, Heri Sukoco

Dengan tidak adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan OC sesuai Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A

tahun 2009 maka susunan keanggotaan **OC belum sama sekali memenuhi persyaratan minimal 30 %.**

OC mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan proses Musrenbangkel sesuai dengan arahan Panitia Pengarah (SC). Dalam pembentukan panitia, Bapak Agus Anwari terpilih sebagai ketua panitia penyelenggara Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010. Dalam Pra Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 secara singkat kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Pembagian tugas panitia Musrenbangkel tahun 2010 (Panitia Pengarah atau SC dan Panitia Pelaksana atau OC).
- 2) Menyusun/merevisi rancangan tata tertib Musrenbangkel
- 3) Melakukan sosialisasi dan menyusun jadwal musyawarah RT/RW
- 4) Penetapan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbangkel.
- 5) Menyusun anggaran Musrenbangkel.
- 6) Musyawarah tingkat RT/RW yang melibatkan semua komponen masyarakat.
- 7) Mengumpulkan prioritas dari RT/RW sebanyak- banyaknya 5
- 8) Evaluasi pelaksanaan pembangunan DPK tahun sebelumnya oleh Tim Monev.
- 9) Evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan tahun berkenaan serta perencanaan tahun berikutnya Program PNPM Mandiri oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

10) Analisa potensi dan penetapan sasaran pembangunan tahunan Kelurahan.

11) Penyusunan prioritas Musrenbangkel terdiri dari :

a. Rumusan kegiatan pembangunan untuk diusulkan ke Musrenbangcam dan akan dilaksanakan oleh SKPD.

b. Prioritas kegiatan pembangunan kelurahan yang akan didanai oleh :

i. Alokasi anggaran dalam SKPD Kelurahan (sesuai pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Lurah)

ii. Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dan atau swadaya masyarakat.

iii. BLM PNPM Mandiri didukung swadaya masyarakat

iv. Sumber dana lainnya selain dana sebagaimana dimaksud pada angka i, ii, iii.

12) Penyampaian prioritas pembangunan tahun berikutnya (dalam bentuk naskah) oleh BAPPEDA, 3 hari sebelum pelaksanaan Musrenbangkel.

13) Mengumumkan jadwal Musrenbangkel 4 hari sebelum pelaksanaan.

14) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbangkel.

Hasil keluaran (output) dari Pra-Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010 ini yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Joyosuran ini

berikutnya untuk menjadi bahan Musrenbangkel (draft Form IV A, Form IV B, Form IV C, dan Form IV D) termasuk didalamnya rancangan kegiatan unggulan Kelurahan.

2.2. Musrenbangkel

2.2. 1. Peserta Musrenbangkel

Musrenbangkel diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara dengan mengupayakan penyelenggaraan Musrenbangkel dilaksanakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan peserta perempuan dapat terlibat secara optimal. Sesuai dengan data dokumentasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota, peserta Musrenbangkel terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah Kelurahan
- b. LPMK
- c. Unsur pengurus RT dan RW (utusan yang mewakili unsur ini dibekali surat tugas serta berita acara hasil musyawarah perencanaan pembangunan setempat)
- d. Tokoh masyarakat/agama.

- e. Wakil Organisasi Sosial/ Kesenian/ Olah Raga/ Kerohanian/ Pemuda/ Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya di tingkat Kelurahan
- f. Sektor Privat
- g. Kelompok masyarakat yang terdapat di Kelurahan.

Adapun peserta Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010 dapat dilihat di dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Unsur-Unsur Peserta Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010

No	Elemen peserta	Jumlah	Prosentase (%)
1	Pemerintah kelurahan	9	8
2	Tokoh masyarakat/agama	5	4
3	Karang taruna	1	1
4	LPMK	3	3
5	RT/ RW	10	9
6	Wakil Organisasi sosial	76	66
7	Sektor Privat	11	9
Jumlah		115	100

Sumber : Diolah dari data panitia Musrenbangkel Joyosuran 2010

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010 telah **dihadiri dan melibatkan berbagai unsur masyarakat** sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A Tahun 2009.

Forum Musrenbangkel Tahun 2010 ini, perempuan yang hadir berasal dari perwakilan PKK, Utusan RW, Posyandu, Kelompok Tani, PAUD, kepengurusan LPMK dan organisasi sosial perempuan lainnya. Panitia Musrenbangkel telah memberikan undangan kepada PKK untuk mengirimkan perwakilannya sebanyak tujuh (7) orang. Berbeda dengan undangan yang lainnya, jumlah undangan untuk PKK

terhitung cukup besar karena umumnya untuk undangan yang lainnya hanya dibatasi oleh satu undangan yang ditujukan kepada ketua organisasi. Untuk mengetahui jumlah perempuan yang hadir di dalam Musrenbangkel Joyosuran Kota Surakarta Tahun 2010 dapat dilihat di dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Unsur-Unsur Peserta Musrenbangkel Joyosuran
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010

No	Elemen peserta	L	(%)	P	(%)
1	Pemerintah kelurahan	7	6	2	2
2	Tokoh masyarakat/agama	3	2	2	2
3	Karang taruna	1	1	-	-
4	LPMK	2	2	1	1
5	RT/ RW	10	9	-	-
6	Wakil Organisasi sosial	42	37	34	29
7	Sektor Privat	8	6	3	3
Jumlah		73	63	42	37

Sumber : Diolah dari data panitia Musrenbangkel Joyosuran 2010

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah prosentase kehadiran perempuan di dalam forum Musrenbangkel Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Tahun 2010 mencapai 31 %. Sedangkan jumlah kehadiran laki-laki mencapai 69 %. Hal ini menunjukkan bahwa **kuota 30 % keterwakilan perempuan sudah dapat terpenuhi.**

2.2. 2. Pelaksanaan dan Hasil Musrenbangkel

Sesuai dengan tahapan-tahapan Musrenbangkel berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A Tahun 2009, persidangan dalam Musrenbangkel Tahun 2010 meliputi Sidang Pleno dan Sidang Komisi sebagai berikut :

a. Sidang Pleno I

Dalam sidang pleno I dilakukan kegiatan :

1. Penetapan SC sebagai Pimpinan Sidang Pleno. Dalam hal forum Musrenbangkel berkehendak atau bersepakat untuk memilih pimpinan sidang secara langsung dari peserta, maka hal tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang hadir.
2. Penyampaian tata tertib oleh Pimpinan Sidang Pleno
3. Pemaparan hasil evaluasi pembangunan DPK dan program PNPM Mandiri tahun sebelumnya, analisa permasalahan, potensi program/kegiatan prioritas pembangunan SKPD Kelurahan serta rancangan kegiatan unggulan Kelurahan oleh Lurah.
4. Penetapan tata cara penyeleksian prioritas kegiatan pembangunan dan DSP kegiatan.
5. Pembagian sidang komisi menurut pengelompokkan urusan pemerintahan daerah atau pengelompokkan SKPD.

b. Sidang Komisi

Dalam sidang komisi dilakukan kegiatan, penyusunan, validasi dan rekapitulasi :

1. DSP kegiatan yang akan didanai dengan alokasi anggaran dalam SKPD Kelurahan (sesuai pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Lurah), Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan (DPK) dan atau Swadaya Masyarakat, BLM PNPM Mandiri didukung swadaya masyarakat serta sumber dana lainnya.
2. Rumusan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan pada Musrenbangcam untuk ditangani SKPD.

c. Sidang Pleno II

Dalam sidang pleno II dilakukan kegiatan :

1. Pemaparan hasil sidang komisi
2. Tanggapan
3. Penetapan kegiatan unggulan kelurahan
4. Pengesahan hasil Sidang Pleno II.
5. Pembentukan Tim Penyempurna Rumusan
6. Penentuan delegasi ke Musrenbangcam sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur :
 - a. Pimpinan Sidang Pleno
 - b. Perwakilan Sidang Komisi
 - c. Ketua Tim Penyempurna Rumusan
7. Pembentukan Tim Perencana Kegiatan Pembangunan, Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan tahun berikutnya.
8. Penyerahan hasil Musrenbangkel kepada Panitia Pengarah untuk diteruskan kepada Panitia Pelaksana.

Keluaran (*output*) dari Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan yang berisi :
 - a. Rumusan Kegiatan pembangunan untuk diusulkan ke Musrenbangcam dan akan dilaksanakan oleh SKPD (Form IVA)

- b. DSP kegiatan pembangunan skala kelurahan yang akan didanai oleh alokasi dalam SKPD kelurahan (sesuai pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Lurah) (Form IV B)
 - c. DSP kegiatan pembangunan skala kelurahan yang akan didanai oleh alokasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) (Form IVC)
 - d. DSP kegiatan pembangunan skala kelurahan yang akan didanai oleh alokasi BLM PNPM Mandiri (Form IV D)
 - e. Prioritas kegiatan pembangunan kelurahan yang akan diusulkan untuk didanai dengan sumber dana lainnya selain dana sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, dan d (Form IV E)
2. Daftar delegasi untuk mengikuti Musrenbangcam

Adapun daftar delegasi yang akan mengikuti Musrenbangcam adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Daftar Delegasi Musrenbangcam 2010

Utusan	L	(%)	P	(%)
Perwakilan sidang komisi	3	52	1	16
Pimpinan sidang pleno	1	16	-	
Ketua Tim Penyempurna Rumusan	-		1	16
Jumlah	4	68	2	32

Sumber : Diolah dari data panitia Musrenbangkel Joyosuran 2010

Dari data di dalam tabel di atas menunjukkan bahwa delegasi yang akan mewakili Kelurahan Joyosuran ke dalam Musrenbangcam Pasar Kliwon 2010 ada sejumlah enam (6) orang. Dengan keterwakilan perempuan 32 % menunjukkan bahwa **kuota 30 % keterwakilan perempuan sudah dapat terpenuhi** sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A Tahun 2009.

3. Susunan Keanggotaan Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan

Adapun susunan panitia perumus Kelurahan Joyosuran Tahun kerja 2011 sebagai berikut :

Ketua : **Dra. Krisnandari**

Sekretaris : Jarno, S.H

Anggota :

i. **Rubiyem**

ii. Ari Purwanto

Dengan adanya keterwakilan dua (2) orang perempuan dalam panitia perumus sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A Tahun 2009. Hal ini berarti **keterwakilan perempuan sudah memenuhi kuota 30 %**. Pada susunan panitia ini perempuan menduduki posisi yang strategis yaitu sebagai ketua.

4. Susunan Keanggotaan Tim Perencana kegiatan Pembangunan

Adapun susunan Panitia Perencana Kelurahan Joyosuran sebagai berikut :

Ketua : Agus Anwari

Sekretaris : Ir. Sutardi, S.T, M.T

Anggota : Dukut Suranto

Berdasarkan data tersebut maka sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A Tahun 2009 **keterwakilan perempuan dalam susunan Panitia Perencana Kelurahan Joyosuran Tahun 2010 tidak memenuhi kuota 30%**.

5. Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan

Ketua : Jumaerry. HM
Sekretaris : Agus Haryono, S.E
Anggota : Joko Santoso

Berdasarkan data tersebut maka sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A Tahun 2009 **keterwakilan perempuan dalam susunan Panitia Pelaksana Kelurahan Joyosuran Tahun 2010 tidak memenuhi kuota 30%.**

6. Susunan keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Pembangunan

Ketua : Endro Rusmono, S.H, M.H
Sekretaris : Hendro Baksono
Anggota : Budi Triyanto

Berdasarkan data tersebut maka sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A Tahun 2009 **keterwakilan perempuan dalam susunan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kelurahan Joyosuran Tahun 2010 tidak memenuhi kuota 30%.**

7. Berita Acara Musrenbangkel

Dari hasil penelitian penulis dengan menggunakan data dokumentasi dan observasi, pelaksanaan Musrenbangkel yang dilaksanakan di Kelurahan Joyosuran Kota Surakarta Tahun 2010 **telah berjalan sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A Tahun 2009** Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Kota dengan **melibatkan seluruh unsur di masyarakat Kelurahan Joyosuran.**

Akan tetapi **kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam susunan kepanitiaan masih banyak yang belum terpenuhi** sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A Tahun 2009. Seperti dalam delegasi ke Musrenbangcam, Tim Perencana dan Pelaksana Pembangunan, serta Tim Moneyv Kegiatan Pembangunan.

2.3. Aktivitas Perempuan Dalam Musrenbangkel

Profil aktivitas merupakan salah satu tinjauan dalam penelitian ini. Profil aktivitas adalah profil yang mendasarkan pada pembagian kerja gender yang memuat daftar tugas perempuan dan tugas laki-laki dengan melihat kegiatan apa yang dilakukan oleh perempuan dan kegiatan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Untuk melihat aktivitas perempuan di dalam Musrenbangkel Joyosuran Kota Surakarta Tahun 2010 peneliti melihat aspek kehadiran perempuan dalam forum tersebut dan keaktifan perempuan dalam mengikuti masing-masing tahapan di dalam Musrenbangkel.

Kehadiran peserta Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 mayoritas masih didominasi oleh laki-laki. Pernyataan tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Muryanti Sugito (60 th) sebagai berikut :

”... kalau Musrenbangkel tahun ini jumlah perempuan yang datang juga banyak. Tapi laki-lakinya lebih banyak. Dari dulu pesertanya memang laki-laki lebih banyak. Saya sendiri saja mewakili PKK terus mbak dari dulu”

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Karsiati selaku ketua RW XII,

Kelurahan Joyosuran :

"... kalau tahun ini pesertanya sudah memenuhi kuota 30 %. Tapi tetap masih banyak peserta laki-lakinya. Dalam Musrenbangkel kemarin banyak perempuan yang datang hanya sebagai undangan. Atau malah hanya "unthul bawang".

Selain itu aktivitas perempuan juga bisa dilihat dari keterlibatannya dalam susunan kepanitiaan Musrenbangkel. Dalam Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010 susunan kepanitiaannya masih didominasi oleh laki-laki. Yang memperkuat dominasi laki-laki yaitu posisi yang strategis masih banyak dikuasai. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Sulastrri (50 th) ;

"... masih banyak laki-laki yang menjadi panitia karena ini merupakan tradisi sejak dulu. Karena sejarahnya seperti itu jadi sulit untuk merubahnya."

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Linda (38 th) yang menyatakan

"... kebanyakan perempuan posisinya sebagai anggota dan seksi konsumsi. Katanya kalau perempuan pantasnya di bagian belakang"

Pernyataan ini dipertegas lagi oleh bapak Atmoyo selaku Ketua RT 03 RW IV

Kelurahan Joyosuran sebagai berikut :

"... selama ini keterlibatan perempuan dalam panitia Musrenbangkel masih dalam bidang tertentu. Dan sebenarnya selalu ada yang terlibat tapi hanya di sie itu-ituu saja yaitu konsumsi dan administrasi"

Di dalam forum Musrenbangkel Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Tahun 2010 aktivitas perempuan bisa dikatakan aktif di dalam forum tersebut dengan memberikan banyak masukan di dalam forum sidang komisi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sulastrri (50 th) sebagai berikut :

”... Kalau saya sendiri kemarin masuk dalam Komisi Sosial Budaya bidang pendidikan usulan yang saya sampaikan adalah peningkatan anggaran PAUD, SKD, dan kegiatan Pokja IV...”

Hal tersebut juga diperkuat pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Karsiati (46 th) selaku Ketua RW XII, sebagai berikut :

”... Dalam Musrenbangkel kemarin banyak perempuan yang datang hanya sebagai undangan. Atau malah hanya ”unthul bawang”. Jadi kadang dia sendiri datang harus ngapain saja tidak tahu. Bisanya hanya ”manthuk-manthuk”. Tapi ada juga yang aktif ikut di mengusulkan di sidang komisi walaupun jumlahnya masih sediki dan hanya sebagai anggota saja”

Berikut ini matriks yang memaparkan mengenai aktivitas peserta dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 :

Matriks 3.2
Profil Aktivitas Dalam Musrenbangkel
Joyosuran Tahun 2010

No	Keterangan	Laki-laki	Perempuan
1	Tingkat kehadiran	Kehadiran laki-laki lebih banyak dan dapat mewakili semua unsur yang ada di masyarakat,	Kehadirannya masih terbatas. Hanya mewakili undangan sebagai perwakilan kelompok perempuan (PKK, Posyandu)
2	Keterlibatan dalam susunan kepanitiaan	Masih mendominasi dalam posisi yang strategis (ketua).	Masih terbatas. Kebanyakan menduduki posisi yang terkait dengan hal-hal yang praktis dan teknis (konsumsi, administrasi). Untuk posisi strategis masih jarang.
3	Keterlibatan dalam sidang komisi	Masih mendominasi posisi yang strategis. Misalkan sebagai ketua.	Untuk posisi yang strategis masih jarang. Masih banyak hanya sebagai anggota.

Sumber : Data diolah, April 2010

2.4. Akses Perempuan Dalam Musrenbangkel

Profil akses digunakan untuk menganalisis siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya produktif dengan memuat daftar pertanyaan perempuan mempunyai atau memperoleh sumber daya apa dan laki-laki memperoleh apa? Perempuan menikmati apa begitu pula laki-laki menikmati apa? Untuk mengetahui akses perempuan dalam Musrenbangkel, penulis meneliti peluang dan kesempatan yang diperoleh dalam menggunakan sumber daya tertentu dengan melihat keterlibatan perempuan dalam empat sidang komisi yang ada di dalam Musrenbangkel Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Tahun 2010. Dengan adanya keterlibatan perempuan dalam sidang komisi, ini berarti perempuan telah memiliki kesempatan untuk meng-*goal*-kan aspirasi dan masukan-masukannya di dalam Daftar Skala Prioritas (DSP) karena di dalam sidang komisi ini perempuan dapat mempertahankan aspirasinya untuk dapat lolos dalam seleksi Daftar Skala Prioritas pembangunan. Di dalam Musrenbangkel, peserta dimasukkan ke dalam empat komisi yang berbeda-beda yaitu Komisi Infrastruktur, Komisi Ekonomi, Komisi Sosial Budaya, dan Komisi Pemerintahan Umum.

Dalam Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010 yang terbagi ke dalam empat komisi, komposisi keterlibatan perempuan dan laki-laki ke dalam masing-masing komisi dapat dicermati pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Komposisi Peserta Sidang Komisi Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010

No	komisi	Laki-laki	(%)	Perempuan	(%)
1	Infrastruktur	11	100	-	0
2	Pemerintahan Umum	9	64	5	36
3	Ekonomi	14	78	4	22
4	Sosial Budaya	10	45	12	55
Jumlah		44	68	21	32

Sumber : Diolah data panitia Musrenbangkel Joyosuran 2010

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari jumlah keseluruhan peserta sidang komisi sebanyak 98 peserta terdapat ketimpangan jumlah prosentase keterwakilan perempuan dengan jumlah prosentase keterwakilan laki-laki. Ketimpangan yang paling mencolok berada di dalam Komisi Infrastruktur di mana jumlah prosentase laki-laki mutlak sebesar 100 %. Sedangkan di Komisi Ekonomi prosentase laki-laki sebesar 78 % untuk perempuan sebesar 22 %. Ketimpangan yang terjadi dalam Komisi Infrastruktur ini seperti pernyataan yang disampaikan oleh Bapak bapak Atmoyo selaku Ketua RT yaitu;

”...kemarin dalam sidang komisi saya masuk di bagian infrastruktur. Saya mengusulkan ada perbaikan parit dan betonisasi di RT 02 RW IV. Dari dulu itu tidak pernah ada perempuan yang mengusulkan pembangunan, yang diusulkan hanya muter di PKK dan posyandu terus..”

Usulan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Bambang Jayanto selaku ketua RT :

”... saya kemarin mengusulkan di komisi infrastruktur mengajukan usul agar jalan di RT 01 RW XII dibetonisasi bagian pinggirnya itu, lha wong kalau hujan masih becek..”

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Jumaerry sebagai ketua SC Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 :

”..setiap tahun selama saya menjabat sebagai ketua SC selama 2 kali tidak ada perwakilan perempuan yang masuk dalam komisi infrastruktur. Biasanya urusan pembangunan diserahkan kepada laki-laki..”

Pembagian ke dalam masing-masing komisi itulah yang akan memberikan kesempatan dan juga peluang yang sama baik itu kepada perempuan maupun laki-laki melalui sidang komisi untuk memiliki kontribusi yang sama dalam memutuskan usulan-usulan masyarakat yang mana saja yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Skala Prioritas (DSP). Dengan keterlibatan perempuan ke dalam sidang komisi baik Komisi Infrastruktur, Komisi Ekonomi, Komisi Sosial Budaya, dan Komisi Pemerintahan Umum secara langsung perempuan telah memiliki kesempatan dalam menyampaikan aspirasi mereka untuk masuk dalam Daftar Skala Prioritas Pembangunan (DSP). Menurut penuturan Ibu Linda sebagai utusan RW III kelurahan Joyosuran bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasinya untuk masuk ke dalam DSP menyatakan sebagai berikut :

”... Misalnya saya di komisi ekonomi mengajukan usulan adanya penambahan modal untuk kegiatan simpan pinjam di tingkat RT. Selama ini kan dana-dana seperti itu tidak pernah sampai di tingkat RT, padahal hampir di setiap RT ada kegiatan simpan pinjam. Nah bagaimana agar itu bisa berkembang, makanya saya mengusulkan itu.

Dengan memasukkan berbagai kepentingan perempuan diharapkan bahwa proses-proses pengambilan keputusan di dalam sidang komisi dapat lebih sensitif terhadap berbagai macam perbedaan seperti perbedaan kepentingan gender. Sebagaimana kepentingan laki-laki, kepentingan perempuan bisa sangat beragam sesuai dengan pengalaman dan prioritas yang dimilikinya yang mungkin berujung

pada agenda keputusan yang berbeda pula. Oleh karena itu, di dalam sidang komisi sebagai forum untuk dapat mempertahankan aspirasi atau usulan, partisipasi yang aktif dari perempuan sangatlah penting. Dengan diperjuangkannya aspirasi perempuan masuk ke dalam Daftar Skala Prioritas, anggaran biaya yang diperoleh akan dapat mencukupi kebutuhan organisasi mereka dalam masa satu (1) tahun mendatang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sulastri (50 th), sebagai berikut :

”... kalau saya sendiri kemarin masuk dalam bidang pendidikan Komisi Sosial Budaya. Usulan yang saya sampaikan adalah peningkatan anggaran PAUD, SKD, dan kegiatan Pokja IV ”

Adapun usulan lain yang disampaikan oleh Ibu Karsiati selaku Ketua RW yang mewakili PKK yaitu sebagai berikut :

”... kemarin saya masuk di komisi umum. Di sana saya mengusulkan adanya bantuan untuk anak gizi kurang dan raskin untuk lebih ditingkatkan”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan ibu Muryanti Sugito selaku kader Posyandu sebagai berikut :

”... kemarin saya mengajukan usul untuk diingatkannya anggaran posyandu khususnya untuk anak gizi kurang. Dan juga kesejahteraan kader lebih diperhatikan”

Berikut ini matriks yang memaparkan akses perempuan dalam forum Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 sebagai berikut :

**Matriks 3.3
Profil Akses Dalam Musrenbangkel
Joyosuran Tahun 2010**

No	Nama	Jenis kelamin	Sidang Komisi	Usulan
1	Linda	P	Ekonomi	Peningkatan modal

	Setyowati			untuk kegiatan simpan pinjam di tingkat RT.
2	Karsiati	P	Pemerintahan Umum	Peningkatan bantuan untuk anak gizi kurang dan raskin.
3	Sulastri	P	Sosial Budaya	Peningkatan anggaran PAUD, SKD, dan kegiatan Pokja IV.
4	Muryanti Sugito	P	Sosial Budaya	Peningkatan anggaran posyandu khususnya untuk anak gizi kurang dan kesejahteraan kader.
5	Atmoyo	L	Infrastruktur	Betonisasi jalan dan perbaikan parit di RT 02 RW IV.
6	Bambang Jayanto	L	Infrastruktur	Betonisasi jalan di RT 01 RW XII.

Sumber : Data diolah, April 2010

2.5. Kontrol Perempuan Dalam Musrenbangkel

Profil kontrol berdasarkan pada pertanyaan perempuan mengambil keputusan atau mengontrol penggunaan sumber daya apa? Laki-laki penentu sumber daya apa? Kontrol perempuan di dalam forum Musrenbangkel berkaitan dengan seberapa besar perempuan memperoleh posisi strategis atau jabatan pada sidang komisi ataupun sidang pleno. Dengan adanya posisi strategis yang diberikan kepada perempuan sangatlah penting karena dengan kontrol yang besar dari perempuan, mereka memiliki kekuatan untuk mengontrol apabila di dalam berjalannya Musrenbangkel terdapat ketidaksesuaian untuk kepentingan perempuan terutama dalam proses penyusunan Daftar Skala Prioritas. Selain itu, perempuan akan lebih memiliki kesempatan untuk memasukkan dan memperjuangkan berbagai kepentingan perempuan di dalam Musrenbangkel karena

sebagaimana kepentingan laki-laki, kepentingan perempuan juga bisa sangat beragam sesuai dengan pengalaman dan prioritas yang dimilikinya yang mungkin berujung pada agenda keputusan yang berbeda pula. Untuk komposisi panitia Musrenbangkel Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Tahun 2010 menurut jenis kelamin dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Komposisi Panitia Musrenbangkel Joyosuran Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2010

No	Kepanitiaan Musrenbangkel	Ketua		Sekretaris		Anggota	
		L	P	L	P	L	P
1	Panitia SC	1	-	1	-	2	1
2	Panitia OC	1	-	1	-	3	-
3	Sidang Komisi						
	Infrastruktur	1	-	1	-	3	-
	Umum	1	-	1	-	2	1
	Ekonomi	-	1	1	-	2	1
	Sosial Budaya	1	-	-	1	2	1
4	Tim Penyempurna Rumusan DSP	-	1	1	-	1	1
5	Tim Pelaksana Pembangunan	1	-	1	-	2	-
6	Tim Monev	1	-	1	-	2	1
Jumlah		6	2	8	1	19	6

1 di atas dapat dilihat bahwa keberadaan perempuan dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 kurang memiliki kontrol karena dari sekian banyak posisi strategis di dalam forum baik itu sebagai SC maupun OC jumlah perempuan yang menduduki posisi ketua

hanya berjumlah 2 orang. Posisi strategis perempuan di dalam Musrenbangkel sangatlah penting karena di dalam forum tersebut semua usulan dari semua unsur masyarakat ditampung dan diseleksi untuk menjadi usulan yang masuk dalam Daftar Skala Prioritas (DSP). Usulan masyarakat yang berhasil masuk ke dalam DSP, nantinya akan di-goalkan oleh forum dan kemudian akan memperoleh anggaran untuk membiayai agenda-agenda tertentu. Apabila di dalam forum pengambilan keputusan perempuan mempunyai andil yang cukup besar maka kemungkinan usulan-usulan perempuan untuk masuk ke dalam DSP akan besar juga. Hal ini seperti pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Linda selaku anggota dalam Sidang Komisi Ekonomi :

”... Kemarin waktu di komisi Ekonomi walaupun usulannya tidak menjadi prioritas yang pertama, tapi lumayan jadi urutan yang ketiga. Semoga nanti masih diperhitungkan juga..”

Informasi yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sulastri selaku anggota dalam Sidang Komisi Sosial Budaya yang mengusulkan adanya peningkatan anggaran PAUD juga tidak menjadi prioritas utama. Padahal menurut beliau itu usulan yang penting sekali. Berkaitan dengan pembentukan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan pembangunan negara ini. Adapun pernyataannya sebagai berikut :

”... Usulan saya untuk peningkatan anggaran PAUD juga tidak jadi prioritas. Saya itu juga bingung kalau usul soal pembangunan mesti cepet tapi kalau soal yang gak keliahtan susah..”

Mengenai usulan yang disampaikan oleh informan laki-laki yang posisinya sama dalam sidang komisi hanya sebagai anggota seperti informasi yang disampaikan oleh Bapak Atmoyo selaku anggota Sidang Komisi Infrastruktur adalah sebagai berikut :

”... Kalau dalam Musrenangkel tahun ini usulan saya menempati prioritas yang pertama. Karena semua anggota sidang komisi menyetujuinya...”

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa kontrol perempuan di dalam forum Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 masih kurang karena dari sekian banyak kepengurusan panitia Musrenbangkel, posisi strategis masih didominasi oleh laki-laki. Posisi perempuan masih menjadi *second person* dalam kepanitiaan antara lain sebagai sekretaris dan anggota. Hal ini seperti informasi yang disampaikan oleh bapak Jumaerry selaku ketua SC Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 :

”... dalam musrenbangkel Joyosuran tahun ini, berdasarkan data kemarin yang ikut menjadi panitia hanya Bu Krisnandari sebagai sekretaris dan Bu rubiyem sebagai anggota....”

Hanya dua (2) orang yang menduduki posisi ketua yaitu di komisi Ekonomi dan Tim Panitia Peyempurna Rumusan Kegiatan. Informasi ini juga disampaikan oleh bapak Jumaerry selaku ketua SC Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 :

”... Posisi perempuan sebagai ketua dalam Musrenbangkel tahun ini ada di komisi ekonomi dan di Tim Panitia Peyempurna Rumusan Kegiatan. Beliau adalah Bu Suryadi dan bu Krisnandari..”

Faktor yang berpengaruh adalah kurangnya kepercayaan diri perempuan di dalam forum publik karena selama ini lebih banyak berperan di sektor domestik. Faktor beban ganda juga berpengaruh. Hal ini menyebabkan perempuan akan berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya lebih dahulu sebelum menjalani aktivitas publik.

Berikut ini matriks yang memaparkan kontrol dalam forum Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 sebagai berikut :

Matriks 3.4
Profil Kontrol Dalam Musrenbangkel
Joyosuran Tahun 2010

No	Nama	Jenis kelamin	Posisi strategis dalam sidang komisi	Urutan usulan dalam DSP
1	Linda Setyowati	P	Anggota	III
2	Sulastri	P	Anggota	V
3	Atmoyo	L	Anggota	I

Sumber : Data diolah, April 2010

2.6. Manfaat Yang Diperoleh Perempuan Dalam Musrenbangkel

Forum Musrenbangkel yang pelaksanaannya hanya sekali dalam setahun, dalam prosesnya benar-benar dimanfaatkan oleh perempuan sebagai media dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan perempuan. Adapun manfaat yang diperoleh dari Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010 , sebagai berikut :

- 1) Dapat menyampaikan usulan-usulan terkait kebutuhan perempuan.

Seperti yang disampaikan oleh informan "Ibu Sulastri (50 th)", sebagai berikut :

"...Ya tentunya yang pertama kita harus memperjuangkan usulan untuk kepentingan perempuan. Kalau bukan kita sendiri siapa lagi. Itu yang paling utama. Selain itu juga menambah pengalaman dan pengetahuan saya. Ke depannya agar perempuan jadi lebih maju dan aktif lagi..."

- 2) Menambah pengalaman dan pengetahuan terutama bagi pribadi

perempuan yang terlibat. Seperti yang disampaikan oleh "Ibu Linda (38 th)", sebagai berikut :

"...kalau saya pribadi bisa tambah pengalaman terutama dalam menyampaikan usulan di dalam Musrenbangkel. Selain itu juga bisa tahu kabar, tambah pengetahuan tentang rencana-rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh kelurahan..."

3) Media informasi dan silaturahmi antar peserta. Hal ini sesuai

dengan informasi yang disampaikan oleh “Ibu Karsiati (49 th)”, sebagai berikut :

“...lha kalau perempuan itu ketemu pasti isine crita karo crita. Jadi yo kita bisa tambah informasi dari sana-sini. Bisa tahu orang-orang warga Joyosuran tidak hanya dalam satu wilayah saja. Tapi yang paling penting juga kita sebagai perempuan harus konsekuen kalau diberi tanggung jawab...”

Berikut ini matriks yang memaparkan manfaat yang diperoleh perempuan dalam forum Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 sebagai berikut :

Matriks 3.5
Profil Manfaat Dalam Musrenbangkel
Joyosuran Tahun 2010

No	Manfaat yang Diperoleh Perempuan dalam Musrenbangkel
1	Dapat menyampaikan usulan-usulan terkait dengan pemenuhan kebutuhan perempuan.
2	Menambah pengalaman dan pengetahuan
3	Media informasi dan silaturahmi antar peserta

Sumber : Data diolah, April 2010

2.7. Faktor-faktor yang Menghambat Perempuan Berpartisipasi

Beberapa faktor yang menghambat partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 antara lain sebagai berikut :

1) Beban kerja domestik yang menimbulkan beban ganda bagi perempuan yang hendak beraktivitas publik. Mengenai tantangan beban kerja ganda yang dialami perempuan seperti informasi yang disampaikan oleh Ibu Karsiati (46 th), sebagai berikut :

”... Perempuan itu kadang banyak kendalanya mbak kalau aktif di luar rumah. Kadang suami melarang, anak-anak tidak ada yang

mengurusi. Kalaupun boleh keluar dengan syarat pekerjaan rumah harus sudah selesai...”

Hal ini didukung oleh pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Urip Djatmiko (50 th) selaku Kepala Kelurahan Joyosuran :

”... perempuan mau jadi wanita karier lebih banyak waktunya di luar rumah bagi saya nggak apa-apa. Tapi tanggung jawab utamanya sebagai istri melayani suami dan sebagai ibu mengurus rumah tangga juga harus diselesaikan dulu. Kalau sudah silahkan mau melakukan apa...”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa peran domestik diyakini bukan menjadi beban bagi perempuan sekalipun itu harus dibagi dengan aktivitas perempuan di luar (peran publik). Dengan anggapan tersebut ketika perempuan harus berada di luar rumah untuk melakukan aktivitas publik, maka tanggung jawab perempuan atas pekerjaan domestik harus sudah dapat diselesaikan. Akibatnya, ketika perempuan masuk wilayah publik akan memunculkan beban ganda (*double burden*) pada diri perempuan. Beban kerja domestik ini terlihat dalam pernyataan informan perempuan yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan yang juga menganggap bahwa pekerjaan domestik menjadi tugas dan pekerjaan perempuan di dalam keluarga.

- 2) Faktor rendahnya pendidikan perempuan yang berakibat tidak siapnya perempuan memasuki wilayah-wilayah publik yang kompetitif dan maskulin, seperti yang dituturkan oleh informan ”Ibu Sulastri (50 th)”, sebagai berikut :

”... dari sisi perempuan sendiri tidak punya persiapan dan kadang tidak peduli. Perempuan tidak berani ngomong di dalam forum, tersendak-sendak, grogi, bahkan sampai ”anyep kabeh”. Dari faktor perempuan yang tidak tahu apa-apa tadi tidak mau belajar...”

Hal ini juga dikemukakan oleh Bapak Bambang Jayanto (55th), sebagai berikut

:

”...dilihat dari tingkat pendidikan itu tidak bisa menjamin, kalau di masyarakat itu yang penting pengalamannya. Sedangkan ibu-ibu di sini itu kadang merasa tidak mampu kalau jadi mengurus Musrenbangkel, padahal laki-laki belum tentu juga ...”

- 3) Kurangnya sosialisasi tentang Musrenbangkel terhadap kader-kader perempuan sehingga menyebabkan perempuan kurang persiapan untuk bisa aktif di dalam forum.

Hal ini seperti informasi yang disampaikan oleh Ibu Gito (60 th), sebagai berikut :

”... untuk tahun ini tidak ada. Karena Pak RWnya tadi mbak nganyelke. Wis ra tahu ana Musling. Tanda tangan hanya formalitas saja. Kalau memberikan undangan senengane mendadak. Jadinya kan juga pengaruh mbak. Kita sendiri kalau di kasih undangan mendadak pasti ga bisa persiapan dulu...”

Pernyataan terkait tersebut juga diungkapkan oleh informan Ibu Karsiati (49 th)

selaku Ketua RW XII, Kelurahan Joyosuran, sebagai berikut :

”... di tempat saya ada tapi perempuannya tidak banyak yang terlibat. Yang diundang hanya karena saya itu cerewet berani ”ngelokke” . Perempuan tidak diajak untuk Musling di RW saya, hanya orang-orang tertentu, tapi kalau di RT saya tidak diundang saya berani protes jadinya ya diundang. Bahkan kadang dari ketua RW sendiri sudah ”ngepal” kalau ibu itu tidak bisa...”

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sulastri (50 th), sebagai berikut :

”... untuk di tingkat RT ketika Pak Moyo masih menjabat masih dilaksanakan musling tapi ketika sudah ganti jadi amburadul semuanya. Sedangkan untuk tahun ini ada kebetulan yang jadi fasilitator suami saya. Rembug warga diadakan tapi perempuan tidak diundang karena mendadak waktunya. Jadi masih sedikit sekali sosialisasi tentang Musrenbangkel untuk tahun ini di wilayah saya...”

- 4) Kurangnya kemampuan memahami kebutuhan perempuan peserta yang mewakili perempuan dalam Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010. Seperti informasi yang disampaikan oleh "Ibu Linda (38 th)", sebagai berikut :

"... masih banyak perempuan yang datang tapi tidak berani menyampaikan pendapat dan usulan. Selain itu karena mereka yang datang tidak tahu akan kebutuhannya perempuan seperti apa..."

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Gito (60 th), sebagai berikut :

"... menurut saya belum semuanya mbak. Kadang-kadang perempuan yang hadir di Musrenbangkel hanya sebagai pelengkap saja. Faktor dari perempuan itu sendiri misalnya dia tidak tahu apa yang mau diusulkan di dalam forum..."

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Ketua SC Musrenbangkel

Joyosuran tahun 2010 yaitu Bapak Jumaerry (50 th), sebagai berikut :

"... perempuan itu sendiri kalau diberi tanggung jawab dalam forum kadang malah bingung. Terus akhirnya juga hanya ikut-ikutan saja dengan kaum laki-laki mbak. Padahal yang tahu kebutuhan perempuan itu kan ya mereka sendiri..."

- 5) Masih kuatnya budaya patriarki sehingga laki-laki masih mendominasi dalam posisi yang strategis. Hal ini seperti informasi yang disampaikan oleh Bapak Atmoyo (55 th), sebagai berikut :

"... belum seimbang . Hal ini disebabkan karena tradisi laki-laki sejak dulu pegang peranan dan dalam pembentukan panitia hanya untuk orang –orang tertentu saja hanya pindah posisi saja tapi orangnya tetap sama..."

Hal senada juga disampaikan oleh informan "Ibu Sulastri (50 th)", sebagai berikut :

”... masih banyak laki-laki yang menjadi panitia karena ini merupakan tradisi sejak dulu. Karena sejarahnya seperti itu jadi sulit untuk merubahnya...”

Pernyataan tentang masih kuatnya budaya patriarki juga di benarkan oleh perempuan seperi yang diungkapkan oleh Ibu Muryanti Sugito (60 th), sebagai berikut :

”... Selama ini perempuan hanya dianggap sebagai konco wingking jadi semua masih dipercayakan pada kaum laki-laki saja. Perempuan itu ya di rumah tugasnya ngurusi anak sama masak...”

Permasalahan perempuan terkait dengan posisi strategis disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya faktor internal atau dari dalam diri perempuan kadang kala menolak apabila ditawarkan posisi strategis. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Karsiati (49 th), sebagai berikut :

”... Ya tadi mbak, kadang perempuan itu sendiri tidak paham harus apa, mau ngapain. Kalau mau usul juga bingung. Karena dia datang hanya utusan dari RT/RW sekedar untuk memenuhi undangan. Ada juga yang sebenarnya pintar mbak, tapi karena tidak ada waktu dan tidak mau datang ke Musrenbangkel. Ada juga yang males datang karena beberapa kali datang mengusulkan tapi usulannya tidak pernah diterima...”

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Muryanti Sugito (60 th), sebagai berikut :

“... Iya, mereka (peserta laki-laki Musrenbangkel) menghendaki pergantian sehingga ada kesejajaran. Ketika ada tawaran untuk jadi panitia SC saja, saya tidak mau karena pasti akan repot dan ribet. Apalagi nanti kalau jadi ketuanya pasti akan lebih repot lagi karena harus datang ke Musrenbangcam...”

Menanggapi komentar yang disampaikan oleh informan perempuan tentang kurangnya minat perempuan menduduki posisi strategis , Pak Sumadiyono (40 th) selaku Ketua LPMK Kelurahan Joyosuran menyatakan :

“... Apabila yang menjadi kendala itu adalah faktor SDM, sebenarnya itu hanya anggapan ibu-ibu saja. Banyak ibu-ibu yang merasa tidak mampu padahal ketika ada banyak tugas, ibu-ibu mampu menyelesaikannya. Saya berkali-kali menawarkan kesempatan kepada perempuan karena saya menilai ibu-ibu lebih mengetahui kepentingan dan kebutuhan, bukan seperti yang bapak-bapak inginkan..”

Selain karena alasan kurang percaya diri akan kemampuan yang dimiliki oleh ibu-ibu, kurang berminatnya perempuan untuk menjadi ketua ataupun jabatan yang lebih strategis lainnya juga dikarenakan perempuan sudah merasa repot dengan kegiatan rumah tangganya. Jumlah perempuan di Kelurahan Joyosuran masih banyak yang berusia produktif yang lebih memilih untuk mendidik anak dan mengelola rumah tangga daripada harus menghadiri forum Musrenbangkel.

Berikut ini matriks yang memaparkan faktor-faktor yang menghambat partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 sebagai berikut :

Matriks 3.6
Faktor-Faktor Yang Menghambat Partisipasi Perempuan Dalam
Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010

No	Faktor-faktor yang Menghambat Partisipasi Perempuan
1	Beban kerja domestik yang menimbulkan beban ganda bagi perempuan yang hendak beraktivitas publik.
2	Rendahnya pendidikan perempuan untuk memasuki wilayah publik yang kompetitif dan maskulin.
3	Kurangnya sosialisasi tentang Musrenbangkel.
4	Kurangnya kemampuan memahami kebutuhan perempuan itu sendiri.
5	Dominasi budaya patriarki.

Sumber : Data diolah, April 2010

2.8. Bentuk-Bentuk Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbangkel

Bentuk-bentuk partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam forum Musrenbangkel. Dusseldorp mencoba membuat klasifikasi dari berbagai tipe partisipasi. Dalam penelitian ini bentuk-bentuk partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel dapat diketahui dari cara keterlibatan perempuan yaitu :

d. Partisipasi langsung

Terjadi bila diri orang itu melaksanakan kegiatan tertentu di dalam proses partisipasi seperti misalnya mengambil peranan di dalam pertemuan-pertemuan, turut diskusi.

e. Partisipasi tidak langsung

Terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya, misalnya pemilihan wakil-wakil di dalam Musrenbangcam.

Dalam penelitian ini yang dikaji adalah bentuk partisipasi langsung perempuan dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Linda (38 th), sebagai berikut :

“... Dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun ini saay mewakili RW III. Saya masuk di dalam Sidang Komisi Ekonomi memperjuangkan usulan mengenai adanya modal untuk kegiatan simpan pinjam di tingkat RT..”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Sulastri perwakilan PKK Kelurahan mengenai partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 yakni sebagai berikut :

“...Kalau saya sendiri kemarin masuk dalam Komisi Sosial Budaya bidang pendidikan usulan yang saya sampaikan adalah peningkatan anggaran PAUD, SKD, dan kegiatan Pokja IV...”

Adapun partisipasi langsung dalam Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010 ini adalah menjadi perwakilan Kelurahan untuk menghadiri Musrenbangcam. Dari 5 (lima orang yang mewakili) 2 orang diantaranya adaah perempuan. Hal ini seperti informasi yang disampaikan oleh Bapak Jumaerry selaku ketua SC :

“... dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun, sebagai utusan kelurahan yang akan berangkat ke Musrenbangcam da perwakilan 2 orang perempuan yaitu Bu krisnandari dan Bu Rubiyem..”

Berikut ini matriks yang memaparkan mengenai partisipasi langsung perempuan dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 :

Matriks 3.7
Bentuk-Bentuk Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010

No	Bentuk Partisipasi
1	Menghadiri Musrenbangkel sebagai utusan atau perwakilan RW, PKK, Posyandu
2	Terlibat dalam susunan kepanitiaan Musrenbangkel.
3	Menyampaikan usulan dalam sidang-sidang komisi.
4	Menjadi perwakilan sebagai utusan Kelurahan untuk ikut terlibat dalam Musrenbangcam.

Sumber : Data diolah, April 2010

B. PEMBAHASAN

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah. Musrenbang sebagai wadah silaturahmi antar masyarakat dengan *stakeholders* pembangunan lainnya untuk mendapatkan keserasian antara kebijakan pembangunan yang ada serta untuk menjaring semua pemangku kepentingan. Dengan adanya Musrenbang diharapkan tidak ada kegiatan-kegiatan

pembangunan yang tumpang tindih yang mengakibatkan sumber daya pembangunan yang terbatas tidak teralokasikan dengan optimal dan tidak ada aspirasi masyarakat yang terabaikan.

Dalam pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan hingga di tingkat Nasional, disebutkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) bahwa perempuan harus dipastikan ikut berpartisipasi. Bahkan, perwakilan perempuan harus dipastikan masuk ke dalam setiap pengiriman delegasi di setiap tahapan Musrenbang yang lebih tinggi. Dengan berpartisipasinya perempuan di setiap Musrenbang, perempuan dapat berpartisipasi untuk memasukkan agenda-agenda kebutuhannya sehingga kebutuhan dan kepentingannya dapat terwakili.

Musrenbangkel diselenggarakan oleh Panitia *Ad Hoc* yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah, pada tahapan persiapan pelaksanaan Musrenbang. Untuk proses pembentukannya difasilitasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Kepala Kelurahan selaku pelindung penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan.

Pelaksanaan Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 18 A tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut maka pelaksanaan Musrenbangkel Joyosutan tahun 2010 diselenggarakan dalam dua tahapan, yaitu : Pra Musrenbangkel dan Musrenbangkel.

Pra Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 dilaksanakan pada Hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2010 pukul 19.30 WIB. Dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Ketua Panitia

Pelaksana Musrenbangkel dibantu oleh fasilitator Kelurahan. Prosesnya diawali dengan pembentukan panitia Musrenbangkel yang terdiri dari *Steering Committee (SC)* dan *Organizing Committee (OC)*. Berdasarkan informasi dan data yang penulis peroleh di lapangan peserta Pra Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 **telah dihadiri oleh semua unsur-unsur masyarakat** seperti yang tertulis pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A tahun 2009.

Hasil keluaran (output) dari Pra-Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010 ini yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Joyosuran ini berikutnya untuk menjadi bahan Musrenbangkel (draft Form IV A, Form IV B, Form IV C, dan Form IV D) termasuk di dalamnya rancangan kegiatan unggulan Kelurahan.

Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 telah dilaksanakan pada Hari Minggu, 31 Januari 2010 pukul 09.00 - 13.10 WIB bertempat di Balai Pertemuan Kelurahan Joyosuran, Jalan Kapten Mulyadi Nomor 274 Surakarta Kode Pos 57116. Berdasarkan informasi dan data yang penulis peroleh di lapangan peserta Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 **telah dihadiri oleh semua unsur-unsur masyarakat** seperti yang tertulis pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A tahun 2009.

Jumlah prosentase kehadiran perempuan di dalam forum Musrenbangkel Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Tahun 2010 mencapai 31 %. Sedangkan jumlah kehadiran laki-laki mencapai 69 %. Hal ini menunjukkan bahwa **kuota 30 % keterwakilan perempuan sudah dapat terpenuhi.**

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A tahun 2009 persidangan dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 meliputi Sidang Pleno dan Sidang Komisi.

Sidang Pleno terdiri dari Pleno I dan Pleno II. Dalam Sidang Pleno I ditetapkan Bapak Jumaerry ditetapkan sebagai Ketua SC dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010.

Keluaran (output) dari Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan.
- b. Daftar Delegasi untuk mengikuti Musrenbangcam.

Berdasarkan pengamatan dan data yang penulis peroleh delegasi yang akan mewakili Kelurahan Joyosuran ke dalam Musrenbangcam Pasar Kliwon 2010 ada sejumlah enam (6) orang. Dengan keterwakilan perempuan 32 % menunjukkan bahwa **kuota 30 % sudah dapat terpenuhi** sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A Tahun 2009.

- c. Susunan Keanggotaan Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan.

Berdasarkan data dan hasil penelitian keterwakilan perempuan dalam panitia perumus **memenuhi kuota 30 %**. Pada susunan panitia ini terdapat perempuan menduduki posisi strategis yaitu sebagai Ketua Ibu Suryadi warga RT 01/ RW III, Kampung Tempen Joyosuran.

- d. Susunan Keanggotaan Tim Perencana Kegiatan Pembangunan.

Berdasarkan data dan hasil penelitian sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A Tahun 2009 keterwakilan perempuan dalam susunan Panitia Pelaksana Kelurahan Joyosuran Tahun 2010 **tidak memenuhi kuota 30%**.

- e. Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A Tahun 2009 dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam susunan Panitia Pelaksana Kelurahan Joyosuran Tahun 2010 **tidak memenuhi kuota 30%**.

f. Berita Acara Musrenbangkel

Dari hasil penelitian penulis dengan menggunakan data dokumentasi dan observasi, maka pelaksanaan Musrenbangkel yang dilaksanakan di Kelurahan Joyosuran Kota Surakarta Tahun 2010 **telah berjalan sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A Tahun 2009** Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota dengan **melibatkan seluruh unsur di masyarakat Kelurahan Joyosuran**.

Akan tetapi **kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam susunan kepanitiaan masih banyak yang belum terpenuhi** sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A Tahun 2009. Seperti dalam delegasi ke Musrenbangcam, Tim Perencana dan Pelaksana Pembangunan, serta Tim Monev Kegiatan Pembangunan.

Dari perencanaan pembangunan partisipatif melalui mekanisme Musrenbangkel Kelurahan Joyosuran tahun 2010 dapat diketahui seberapa besar partisipasi dari kelompok perempuan dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta upaya melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Pentingnya partisipasi perempuan tidak lagi dapat diabaikan karena partisipasi perempuan pada saat ini relatif rendah dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang berbasis partisipasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 18 A Tahun 2009.

Dalam mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif yaitu Musrenbangkel, penulis menggunakan teknik analisis responsif gender model Harvard. Teknik ini sering disebut *Gender Framework Analysis* (GFA) yaitu suatu analisis yang digunakan untuk melihat profil gender dari suatu kelompok sosial dan peran gender dalam proyek pembangunan, yang mengutarakan perlunya tiga komponen dan interrelasi antara satu sama lain yaitu profil aktivitas, akses, dan kontrol. Adapun hasil penelitian terkait dengan partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 ditinjau dari aktivitas, akses, kontrol dan manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Aktivitas Perempuan dalam Musrenbangkel Joyosuran

Untuk melihat aktivitas perempuan di dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 peneliti melihat dari aspek kehadiran perempuan dalam forum tersebut dan keaktifan dalam mengikuti masing-masing tahapan di dalam Musrenbangkel.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis aktivitas perempuan bisa dikatakan cukup aktif dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 dengan keterwakilan perempuan sebesar 37% sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 18 A tahun 2009. Selain itu di dalam forum Musrenbangkel perempuan ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan penentuan skala prioritas di dalam sidang komisi. Dalam Musrenbangkel usulan dan saran yang disampaikan cukup banyak seperti peningkatan anggaran untuk Posyandu, PAUD, adanya modal untuk kegiatan simpan pinjam di tingkat RT, peningkatan raskin dan sebagainya.

2. Akses Perempuan dalam Musrenbangkel Joyosuran

Untuk mengetahui akses perempuan dalam Musrenbangkel Joyosuran penulis meneliti peluang dan kesempatan yang diperoleh perempuan dengan melihat keterlibatan perempuan dalam empat sidang komisi yang ada di Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010. Dengan adanya keterlibatan perempuan dalam empat sidang Komisi yang ada berarti perempuan telah memiliki kesempatan untuk menggoalkan aspirasi dan memasukannya dalam DSP karena dalam sidang komisi inilah perempuan dapat mempertahankan aspirasinya untuk dapat lolos dalam seleksi daftar skala prioritas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa ada keterlibatan perempuan dalam komisi. Akses perempuan dilihat dari keterlibatannya dalam Komisi Infrastruktur (0%), Komisi Pemerintahan umum (36%), Komisi Ekonomi (22%), dan Komisi Sosial Budaya (55%). Akses perempuan di dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 melalui sidang komisi paling banyak berada di Komisi Sosial Budaya karena keahlian perempuan lebih dimanfaatkan dibandingkan dengan komisi yang lain.

3. Kontrol Perempuan dalam Musrenbangkel Joyosuran

Dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 kontrol perempuan kurang memiliki kontrol karena dari sekian banyak posisi strategis baik dalam panitia pengarah dan panitia pelaksana, dari Ketua Komisi hingga Ketua Tim keterwakilan perempuan belum memenuhi kuota 30 % sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 18 A tahun 2009. Padahal untuk dapat memperjuangkan permasalahan perempuan agar masuk ke dalam Daftar Skala Prioritas (DSP) pembangunan, maka perempuan

haruslah terlibat dan berpartisipasi langsung dengan menjadi panitia Musrenbangkel yang memiliki kewenangan strategis.

4. Manfaat yang Diperoleh Perempuan dalam Musrenbangkel Joyosuran

Walaupun dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 masih didominasi oleh laki-laki tetapi forum Musrenbangkel Joyosuran tahun ini telah memberikan manfaat yang dirasakan oleh perempuan antara lain menambah pengalaman, informasi dan pengetahuan terkait program-program yang dilakukan oleh pemerintah lokal Kelurahan dalam waktu satu tahun ke depan, menjadi media silaturahmi antar warga Joyosuran dan sebagainya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini berusaha untuk meneliti tentang partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar

Kliwon, Kota Surakarta tahun 2010. Pelaksanaan Musrenbangkel Tahun 2010 yang dilaksanakan di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta telah berjalan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 18 A Tahun 2009 dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Kelurahan Joyosuran. Tahapan-tahapan dalam proses Musrenbangkel dimulai dari Pra-Musrenbangkel dan Musrenbangkel telah menghasilkan usulan yang masuk dalam daftar skala prioritas pembangunan yang dibiayai dari dana bantuan pembangunan Kelurahan dan swadaya masyarakat, usulan yang masuk dalam daftar skala prioritas pembangunan yang diajukan atau diusulkan ke Musrenbangkel tahun 2010 Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

Penulis mengetahui aspek-aspek yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan partisipatif yang mencakup partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif ditinjau dari aspek aktivitas, akses, kontrol, dan manfaatnya bagi perempuan. Adapun hasil penelitian terkait dengan partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel dilihat dari profil aktivitas, akses, kontrol dan manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Aktivitas Perempuan Dalam Musrenbangkel

Untuk melihat aktivitas perempuan di dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 peneliti melihat dari aspek kehadiran perempuan dalam forum tersebut dan keaktifan dalam mengikuti masing-masing tahapan di dalam Musrenbangkel.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis aktivitas perempuan bisa dikatakan cukup aktif dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 dengan keterwakilan perempuan sebesar 37% sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 18 A tahun 2009. Selain itu di dalam forum Musrenbangkel perempuan ikut terlibat dalam

proses pengambilan keputusan berdasarkan penentuan skala prioritas di dalam sidang komisi. Dalam Musrenbangkel usulan dan saran yang disampaikan cukup banyak seperti peningkatan anggaran untuk posyandu, PAUD, adanya modal untuk kegiatan simpan pinjam di tingkat RT, peningkatan raskin dan sebagainya.

2. Akses Perempuan Dalam Musrenbangkel

Musrenbangkel Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tahun 2010 dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam Komisi Infrastruktur (0%), Komisi Pemerintahan Umum (36%), Komisi Ekonomi (22%), dan Komisi Sosial Budaya (55%). Akses perempuan di dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 melalui sidang komisi paling banyak berada di Komisi Sosial Budaya karena keahlian perempuan lebih dimanfaatkan dalam komisi tersebut dibandingkan dengan komisi lainnya.

3. Kontrol Perempuan Dalam Musrenbangkel

Kontrol perempuan dalam forum Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 masih kurang. Hal tersebut dibuktikan dengan posisi strategis yang dipegang perempuan masih terbatas. Dari sekian banyak posisi strategis di dalam forum baik itu sebagai SC maupun OC jumlah perempuan yang menduduki posisi ketua hanya berjumlah 2 orang masih banyak perempuan yang hanya menjadi anggota saja.

4. Manfaat Yang Diperoleh Perempuan Di Dalam Musrenbangkel

Forum Musrenbangkel yang pelaksanaannya hanya sekali dalam setahun, dalam prosesnya benar-benar dimanfaatkan oleh perempuan sebagai media dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan perempuan. Adapun manfaat yang diperoleh dari Musrenbangkel Joyosuran Tahun 2010, sebagai berikut :

- a. Dapat menyampaikan usulan-usulan terkait dengan pemenuhan kebutuhan perempuan.
- b. Menambah pengalaman dan pengetahuan
- c. Media informasi dan silaturahmi antar peserta

5. Faktor-faktor Yang Menghambat Perempuan Berpartisipasi Dalam Musrenbangkel

Adapun faktor-faktor yang menghambat partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Beban kerja domestik yang menimbulkan beban ganda bagi perempuan yang hendak beraktivitas publik.
- b. Kurangnya sosialisasi tentang Musrenbangkel.
- c. Kurangnya kemampuan memahami kebutuhan perempuan itu sendiri.
- d. Dominasi budaya patriarki.
- e. Rendahnya pendidikan perempuan untuk memasuki wilayah publik yang kompetitif dan maskulin.

B. Implikasi

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis akan menyajikan beberapa implikasi penelitian sebagai berikut :

1. Implikasi Empiris

Partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel merupakan suatu proses penyampaian aspirasi dan kepentingan perempuan dalam penyusunan rencana pembangunan. Hal ini sangat penting karena dengan berpartisipasinya perempuan di setiap Musrenbang,

perempuan dapat berpartisipasi untuk memasukkan agenda-agenda kebutuhannya sehingga kebutuhan dan kepentingannya dapat terwakili.

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2010 di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta cukup baik.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya keinginan kaum perempuan untuk terlibat dalam proses Musrenbangkel. Menurutnya yang mempunyai hak untuk berpartisipasi bukan hanya kaum laki-laki semata, namun seiring dengan perubahan zaman perempuan juga berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam ranah publik.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bentuk-bentuk partisipasi langsung perempuan dalam Musrenbang di Kelurahan Joyosuran tahun 2010 adalah menghadiri Musrenbangkel sebagai utusan atau perwakilan RW, PKK, Posyandu, ikut terlibat dalam susunan kepanitiaan Musrenbangkel, menyampaikan usulan dalam sidang-sidang komisi, dan juga menjadi perwakilan sebagai utusan Kelurahan untuk ikut terlibat dalam Musrenbangcam.

2. Implikasi Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi. Sedangkan teori yang digunakan untuk mengkaji masalah ini adalah menggunakan teknik analisis responsif gender model Harvard.

Hasil penelitian ini secara teoritis mendukung teknik analisis yang menekankan pada partisipasi perempuan dalam Musrenbang di Kelurahan Joyosuran tahun 2010.

Di dalam teknik analisis responsif gender model Harvard untuk melihat partisipasi dapat dilihat dari profil aktivitas, akses, kontrol dan manfaatnya.

Dalam melihat profil aktivitas perempuan di dalam Musrenbangkel Joyosuran Kota Surakarta Tahun 2010 peneliti melihat aspek kehadiran perempuan dalam forum tersebut dan keaktifan perempuan dalam mengikuti masing-masing tahapan di dalam Musrenbangkel. Kehadiran perempuan dalam Musrenbangkel merupakan salah satu **bentuk partisipasi secara langsung dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010.**

Sedangkan dengan melihat profil akses peneliti dapat diketahui dengan melihat **keterlibatan perempuan dalam empat sidang komisi yang ada di dalam Musrenbangkel Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Tahun 2010.** Dengan adanya keterlibatan perempuan dalam sidang komisi, ini berarti perempuan telah memiliki kesempatan untuk meng-*goal*-kan aspirasi dan masukan-masukannya di dalam Daftar Skala Prioritas (DSP) karena di dalam sidang komisi ini perempuan dapat mempertahankan aspirasinya untuk dapat lolos dalam seleksi Daftar Skala Prioritas pembangunan.

Selain itu kontrol juga sangat penting dalam Musrenbangkel **melalui posisi strategis perempuan dalam sidang komisi. Karena dengan kontrol yang besar dari perempuan, mereka memiliki kekuatan untuk mengontrol apabila di dalam berjalannya Musrenbangkel** terdapat ketidaksesuaian untuk kepentingan perempuan terutama dalam proses penyusunan Daftar Skala Prioritas. Selain itu, perempuan akan lebih memiliki kesempatan untuk memasukkan dan memperjuangkan berbagai kepentingan dan kebutuhan perempuan.

Jadi dengan menggunakan teknik analisis gender model Harvard dalam penelitian ini sangat mendukung penelitian yang penulis lakukan.

3. Implikasi Metodologis

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2010 di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

Sesuai dengan metode penelitian kualitatif ini, maka peneliti menjadi instrumen penelitian dalam mencari dan mengumpulkan data lengkap dengan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Yaitu kurangnya pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam bidang perencanaan pembangunan.

Dalam penelitian ini informan dipilih berdasarkan *purposive sampling* dan disesuaikan dengan derajat kebutuhan. Dengan menggunakan teknik tersebut terasa cukup efektif sebab peneliti dapat menemukan informasi yang tepat dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah panitia pelaksanaan Musrenbangkel, Pengurus LPMK Kelurahan Joyosuran, aktivis perempuan di PKK maupun kelompok yang lain, dan Kepala Kelurahan Joyosuran.

Untuk keperluan triangulasi, peneliti menggunakan triangulasi sumber data yang diperoleh dari informan lain agar mempunyai validitas tinggi. Proses tersebut diawali dengan pengumpulan data, karena data yang diperoleh selalu berkembang di lapangan. Maka penulis selalu membuat reduksi data dan kajian data. Penulis membuat singkatan dan menyeleksi data yang diperoleh di lapangan. Kemudian

diikuti dengan penyusunan kajian data yang berupa contoh atau uraian yang sistematis.

Setelah pengumpulan data berakhir, tindakan penelitian selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam penulisan reduksi data dan penyajian data. Secara metodologis, hasil penelitian ini tidak dapat dibuat generalisasi dan hanya berlaku pada lokasi penelitian. Namun hasil dari penelitian yang ada mampu mengungkapkan realitas secara lebih mendalam sehingga memungkinkan memberi gambaran realitas sebagaimana adanya.

C. SARAN

Dengan selesainya penelitian ini bukan berarti tidak terdapat ruang-ruang perbaikan. Oleh karena itu penelitian dengan tema yang serupa dapat dilakukan dengan lebih baik oleh peneliti lain di masa datang. Dengan selesainya penelitian ini ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu :

1. Aktivitas perempuan Dalam Musrenbangkel

Dalam pelaksanaan Musrenbangkel seharusnya ada peningkatan kuota kehadiran perempuan. Sehingga perempuan dapat ikut terlibat aktif di dalam forum maupun dalam susunan kepanitiaannya.

2. Akses Perempuan Dalam Musrenbangkel

Dalam Musrenbangkel hendaknya ada keterlibatan perempuan di dalam Komisi Infrastruktur. Hal ini dapat dilakukan panitia Musrenbangkel dengan melibatkan

perempuan di semua sidang komisi dalam Musrenbangkel. Sehingga perempuan dan laki-laki mempunyai peluang dan kesempatan yang sama.

3. Kontrol Perempuan Dalam Musrenbangkel

Untuk meningkatkan kontrol yang dimiliki perempuan dalam Musrenbangkel dapat dilakukan dengan memberikan dorongan dan kepercayaan untuk menduduki posisi yang strategis. Sehingga dengan posisi yang strategis tersebut perempuan ikut berperan dalam proses pengambilan keputusan dan juga memberikan motivasi kepada perempuan untuk memanfaatkan peluang atau kesempatan dalam Musrenbangkel secara maksimal.

4. Faktor-faktor Yang Menghambat Perempuan Berpartisipasi Dalam Musrenbangkel

Untuk mengurangi faktor-faktor yang menghambat perempuan berpartisipasi dalam Musrenbangkel dapat dilakukan dengan **meningkatkan sosialisasi** arti pentingnya Musrenbangkel kepada berbagai pihak khususnya perempuan. Sehingga dengan informasi yang diterima oleh perempuan mampu meningkatkan pengetahuan dan kepedulian dalam Musrenbangkel.

Seharusnya juga dilakukan proses kaderisasi sehingga ada regenerasi untuk kader perempuan ikut terlibat dalam proses Musrenbangkel ke depannya.

Selain itu seiring dengan proses perkembangan jaman diharapkan perempuan mampu meningkatkan kapasitasnya. Sehingga siap dan mampu menghadapi wilayah publik yang kompetitif dan maskulin.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi, Ambarsari, C, et.all. 2002. *Kebijakan Publik & Partisipasi Perempuan*. Surakarta: PATTIRO.
- Fakih , Mansour. 2005. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.
- Moleong, Lexy, J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Radjiman. 1984. *Sejarah Mataram Kartasura sampai Surakarta Hadiningrat*.
- Slamet, Yulius. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi..* Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Slamet, Yulius. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sugiartoto, Dody, Agus. 2003. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Solo: Pendekatan Pembangunan Nguwongke-Uwong*. Solo: IPGI.
- Sutopo, HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1978. *Beberapa Teknik di dalam Hubungan Kerja*. Yogyakarta : BPA Universitas Gajah Mada.
- Utami, Siwi, Tari. 2001. *Perempuan Politik di Parlemen*. Yogyakarta: Gama Media.

Peraturan Undang-Undang :

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Kelurahan Kota Surakarta.

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 A Tahun 2009 Tentang Pedoman Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Pembangunan kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutaman Gender dalam Pembangunan di Daerah.

Makalah :

Adhiyaksa, Sri. 2009. "Pemanfaatan Peluang Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbang".
(Makalah Seminar Hotel Dana Solo, 30 November 2009)

Jurnal Internasional :

Smitha Mishra Panda. "Mainstreaming gender in Water Management: A Critical View". Journal Gender Technology and Development 2007; 11; 321 (hal. 2).

Website

<http://konsorsiumsolo.multiply.com/journal/>

Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan

Jul 31, '09 10:24 AM

